

BERMITRA MENGELOLA LUMPUR TINJA

Catatan Pembelajaran *Twinning Program*
Pengelolaan Air Limbah Domestik
di Sulawesi Selatan



BERMITRA MENGELOLA LUMPUR TINJA

Catatan Pembelajaran *Twinning Program*
Pengelolaan Air Limbah Domestik
di Sulawesi Selatan

BERMITRA MENGELOLA LUMPUR TINJA

Catatan Pembelajaran *Twinning Program*
Pengelolaan Air Limbah Domestik
di Sulawesi Selatan

Tim Penyusun

Penulis: Ghulanyudi WJ

Narasumber:

Tim Mentee UPTD PALD Parepare

Tim Mentee UPTD PALD Pinrang

Tim Mentee UPTD PALD Palopo

Tim Mentee UPTD PALD Sidoarjo

Tim Mentee UPTD PALD Gresik

Tim Editor:

Andi Bunga Tongeng

Hamsah Sinring

Ita Ibnu

Victoria Ngantung

Wahyu Handoyo

Wildan Setiabudi

Buku ini diterbitkan Yayasan BaKTI atas dukungan UNICEF Indonesia

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Singkatan.....	ii
Pengantar.....	1
Menjalin Mitra Mengelola Lumpur Tinja	6
<i>Tentang Twinning Program</i>	
Bangkit Dari Ketiadaan Panduan dan SDM Tanpa Keahlian	11
<i>Pembelajaran Twinning Program dari Pinrang</i>	
Membenahi LPLT dan Mencari Induk Baru UPTD	28
<i>Proses Twinning Program untuk Peningkatan Layanan di Parepare</i>	
Menata Lembaga, Memperbaiki Layanan Lumpur Tinja.....	46
<i>Komitmen Kota Palopo Meningkatkan Layanan melalui Twinning Program</i>	

Daftar Singkatan

AHL	<i>Advocacy Horizontal Learning</i>	PALD	Pengelolaan Air Limbah Domestik
AKKOPSI	Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi	PLCD	Pengelolaan Limbah Cair Domestik
AMPL	Air Minum dan Kesehatan Lingkungan	PNS	Pegawai Negeri Sipil
Anjab	Analisa Jabatan	POKJA	Kelompok Kerja
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	PPAS	Pembangunan Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi
ASN	Aparatur Sipil Negara	PPSP	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
AUSAID	<i>Australian Aid</i>	PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
BOD	<i>Biological Oxygen Demand</i>	RKTL	Rencana Kerja Tindak Lanjut
COD	<i>Chemical Oxygen Demand</i>	SDB	<i>Sludge Drying Bed</i>
DLH	Dinas Lingkungan Hidup	SDM	Sumber Daya Manusia
FORKALIM	Forum Komunikasi Air Limbah	SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
IPLT	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	SPALD	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
IUWASH	<i>Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene</i>	SPM	Standar Pelayanan Minimal
KIAT	Kemitraan Australia Indonesia untuk Infrastruktur	SSC	<i>Solid Separation Chamber</i>
KK	Kepala Keluarga	SSK	Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat	SSP	<i>Senior Service Provider</i>
LLTT	Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	TPA	Tempat Pemrosesan Akhir
MIS	Management Information System	Tupoksi	Tugas Pokok dan Fungsi
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>	UNICEF	<i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
MPP	Manual Pengelolaan Program	UPT	Unit Pelaksana Teknis
OM	<i>Operation and Maintenance</i>	UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
OP	Operasi dan Pemeliharaan	USDP	<i>Urban Sanitation Development Program</i>
OPD	Organisasi Perangkat Daerah	Yayasan BaKTI	Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
Ortala	Organisasi dan Tata Laksana		
PAL	Pengelolaan Air Limbah		



...sampai akhir tahun 2018,
sebanyak 66 juta warga
di Indonesia belum memiliki
akses air limbah domestik
yang layak...

PENGANTAR

Pengelolaan lumpur tinja dilakukan sejak hulu hingga hilir. Alur pengelolaannya sering disebut dengan sejumlah istilah seperti rantai layanan lumpur tinja, 5 pilar pengelolaan lumpur tinja, atau 4 sehat 5 sempurna Pengelolaan Air Limbah Domestik. Semua istilah atau penamaan itu menunjukkan satu sistem integral. Artinya, jika melakukan pengelolaan maka seluruh sub sistem itu harus dilakukan, dari hulu hingga hilir dan tidak bisa parsial. Istilah-istilah itu juga bertujuan agar sistem pengelolaan ini lebih dikenal publik dan semakin banyak pihak yang memahami dan menjalankannya.

Prinsip pengelolaan dari ragam istilah itu sama, yakni menyentuh semua sub sistem dari hulu hingga hilir. Semua sub sistem dari hulu hingga hilir dijalankan secara benar dan sehat. Sehat di sini maksudnya dari bahan dasarnya baik dan cara pengelolaannya pun tidak akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Sebagaimana kita kenal 4 sehat 5 sempurna dalam makanan, di mana empat jenis sumber gizi yang dibutuhkan tubuh berasal dari makanan berbahan dasar baik



dan sehat, mulai dari nasi, sayur mayur, lauk pauk dan buah-buahan ditambah susu sebagai penyempurna.

Sistem 4 sehat 5 sempurna dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik pun terdiri 4 sub sistem yang baik dan sehat. Empat sehat di sini meliputi: **Pertama** adalah kondisi sehat di hulu atau di rumah kita. Hal ini terkait dengan pemisahan air kakus dengan sistem setempat yang benar. Air kakus masuk ke dalam penampungan atau tangki septik. Sejurus dengan hal itu,

tangki septik di rumah kita harus kedap atau tidak bocor.

Kedua yaitu penyedotan lumpur tinja secara rutin. Untuk mayoritas kondisi tangki septik di rumah-rumah warga di Indonesia, penyedotan ini biasanya antara 3 atau 4 tahun sekali. **Ketiga** yaitu pengangkutan lumpur tinja yang terkawal yang sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*). **Keempat** adalah membuang lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pengolahan lumpur tinja yang efektif di IPLT. Dan **Kelima** yaitu pemanfaatan lumpur olahan yang aman bagi lingkungan.

Sistem pengelolaan lumpur tinja yang terintegrasi dari hulu hingga hilir itu, secara faktual di lapangan belum sesuai dengan yang diharapkan. Data dari sejumlah lembaga, baik kondisi secara nasional maupun daerah, situasinya nyaris sama. Kondisi pengelolaan air limbah domestik atau lumpur tinja yang ada masih memerlukan perhatian banyak kalangan.

Kesenjangan Antara Mandat Peraturan dan Kenyataan di Lapangan

Berdasarkan aturan, pengelolaan air limbah domestik menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Bahkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa air limbah domestik menjadi prioritas pembangunan di daerah. Air limbah domestik digolongkan sebagai urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar.

Amanat secara lebih detil yang dimuat dalam peraturan tersebut terdapat dalam lampiran C terkait pembagian kewenangan sub urusan air limbah. Di sana disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik berada di pemerintah kabupaten/kota.

Amanat yang sama diperjelas lagi dengan peraturan turunan dari undang-undang, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018. Peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) itu tegas menyebut bahwa air limbah domestik masuk ke dalam jenis pelayanan dasar pada SPM.

Menyimak kedua peraturan tersebut, telah jelas bahwa pemerintah kabupaten/kota tak bisa menghindari kewajibannya, memenuhi hak dasar pelayanan untuk warga itu. Namun kenyataan di lapangan berkata lain.

FORKALIM Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik dalam salah satu bahan presentasinya menyebutkan, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 253

kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Dari data tersebut juga diketahui, di kabupaten/kota yang telah memiliki IPLT tidak dibarengi dengan pengelolaan yang benar. Alhasil, IPLT di Indonesia banyak yang tidak berfungsi optimal dan bahkan mengalami kerusakan.

Gambaran itu juga tersurat dalam buku Profil Sanitasi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Sarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan. Dalam buku tersebut disebutkan, dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan hanya ada 7 (tujuh) IPLT yang berfungsi. Sebanyak 6 (enam) IPLT belum berfungsi, 2 rusak dan ada 9 (sembilan) kabupaten/kota yang tidak memiliki IPLT.

Kondisi IPLT sebagai wilayah hilir dari sistem pengelolaan lumpur tinja saling berkaitan dengan subsistem sebelumnya. Jika kondisi sumber atau tangki septik warga tidak sesuai standar, akan mengurangi volume lumpur tinja yang terbentuk. Volume yang sedikit itu akan memengaruhi proses pengolahan di IPLT. Berdasarkan data di lapangan, penyebab terbesar kerusakan IPLT adalah karena minimnya lumpur tinja yang diolah.

Penyebab warga tidak melakukan penyedotan lumpur tinja di rumahnya sebagai akibat belum adanya kewajiban penyedotan lumpur tinja. Hal ini disebabkan kondisi IPLT yang belum siap. Kondisi ini tentu mengancam warga dari berbagai penyakit yang bersumber dari lingkungan, sebab tinja yang belum terkelola itu berpotensi mencemari lingkungan.

Rangkaian sub sistem yang belum berjalan itu, menandakan bahwa pengelolaan lumpur tinja di Sulawesi Selatan belum beroperasi secara integral.

Ikhtiar Perbaikan

Berbagai ikhtiar sudah dilakukan parapihak. Langkah-langkah komunikasi dan advokasi di jajaran pengambil keputusan (bupati/walikota) aktif dijalankan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Aliansi yang dijalankan para bupati/walikota pegiat dan peduli sanitasi itu sering melakukan event advokasi sanitasi bagi para sejawatnya. Kegiatan *Advocacy Horizontal Learning* (AHL), sebagai salah satu contohnya.

Data kepesertaan anggota AKKOPSI sebagaimana disampaikan Sekretariat Nasional AKKOPSI juga terus meningkat. Hingga tahun 2020 telah bergabung 492



bupati/walikota sebagai anggota. Jajaran kepemimpinan aktif AKKOPSI yakni 11 orang adalah bupati/walikota aktif. AKKOPSI dan jajarannya terus berikhtiar agar para pimpinan di daerah peduli dan memprioritaskan pembangunan sanitasi. Kepedulian itu penting, karena komitmen bupati/walikota adalah kunci keberhasilan pembangunan sanitasi di daerah.

Di Provinsi Sulawesi Selatan upaya memperbaiki kondisi sanitasi juga telah dan terus dilakukan. Setidaknya sejak tahun 2011 hingga saat ini, 24 kabupaten/kota telah memiliki dokumen penting sanitasi bernama Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Dokumen SSK menjadi acuan utama untuk memulai langkah perbaikan sanitasi di daerah.

Dalam beberapa tahun ini pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan juga aktif mengikuti sejumlah program sanitasi, baik dari pemerintah pusat maupun negara donor. Sejumlah program itu misalnya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dari dan Program Hibah Air Limbah Setempat Pemerintah Pusat, sejumlah program dari UNICEF-Indonesia, *Urban Sanitation Development Program* (USDP) dari Kedutaan Belanda, Indonesia *Urban Sanitation and Hygiene* (IUWASH) Plus dari USAID dan KIAM dari DFAT Australia.

Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti *Twining Program*. Program ini diikuti Kota Palopo, Parepare dan Kabupaten Pinrang. Perihal apa dan bagaimana program tersebut, pembaca dapat menikmatinya dalam buku ini.

Buku ini mencatat proses yang dilalui dan dijalankan ketiga wilayah itu dalam mengikuti program ini. Buku ini merupakan catatan pembelajaran yang diperoleh dari proses tersebut yang diharapkan dapat bermanfaat bagi operator pengelola lumpur tinja, regulator di tingkat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), sampai dengan para pengambil kebijakan.

Karena berisi catatan pembelajaran, buku ini bukanlah sebuah buku tentang petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak), tentang perbaikan layanan lumpur tinja yang dapat dilakukan oleh kabupaten/kota. Namun demikian, buku ini menceritakan kisah tentang keinginan dan upaya perbaikan. Selain itu, juga terdapat cerita mengenai bagaimana semua pihak memainkan peran, serta melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tentu, dalam konteks pengelolaan lumpur tinja menuju perbaikan layanan untuk warga.

Buku ini bisa jadi tak lengkap. Namun sesedikit atau tak sepenuhnya sebuah catatan, ia akan bisa dibaca kapanpun. Buku ini diharapkan memuat pembelajaran yang bisa dipelajari, mulai proses perbaikan teknis layanan, perbaikan sarana IPLT, hingga pemindahan atau pembentukan kelembagaan baru terkait pengelolaan lumpur tinja. Proses yang dilalui ketiga kabupaten/kota itu adalah ikhtiar, sebagaimana pula buku ini, sebuah upaya penyadaran menuju perbaikan layanan.



MENJALIN MITRA MENGELOLA LUMPUR TINJA

Tentang *Twinning Program*



Satu program inovatif dalam pengembangan kapasitas pengelolaan lumpur tinja diluncurkan FORKALIM Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik. Program bernama *Twinning Program* itu dijalankan di sejumlah provinsi termasuk Sulawesi Selatan. Di provinsi ini, tiga daerah yakni Kota Palopo, Parepare dan Kabupaten Pinrang menjadi pesertanya.

Ini program kolaborasi para pihak. Di samping FORKALIM sebagai penggagas, program ini juga didukung IUWASH Plus-USAID. Implementasi program di Sulawesi Selatan pembiayaan program didukung UNICEF dan dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan BaKTI serta dibantu fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Sulawesi Selatan.

Twinning program dirancang untuk meningkatkan kapasitas operator air limbah domestik dengan melakukan kemitraan antar operator air limbah domestik antar kabupaten/kota.

Program ini dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip berbagi (*sharing*) dan pendampingan antara *mentor* dengan *mentee*. Proses berbagi dan pendampingan ini dilaksanakan dengan membagi ilmu, pengetahuan ataupun pengalaman serta pendampingan agar *mentee* dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang direncanakan di awal.

Mentor dan Mentee

Twinning Program memiliki nilai tambah jika dibandingkan dengan program-program pendampingan pengelolaan lumpur tinja yang telah ada. Di antara yang dapat disebutkan sebagai nilai tambah itu, pertama adanya *mentor* dan *mentee*.

Apa itu *mentor* dan *mentee*?

Mentor adalah operator air limbah domestik sebuah kabupaten/kota yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keberhasilan dalam topik tertentu dalam pengelolaan lumpur tinja. Operator tersebut juga dinilai berhasil dalam mengelola lumpur tinja di daerahnya. Keberhasilan itu baik dalam operasionalisasi sarana maupun kelembagaannya. Kabupaten/kota dengan kondisi demikian menjadi *mentor* atau pembimbing bagi kabupaten/kota lain yang kondisinya belum sebaik *mentor*.

Sedangkan *mentee* merupakan operator air limbah di kota/kabupaten yang bersedia untuk mengikuti program untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja layanan. *Mentee* didampingi dan atau dilatih oleh *mentor*.

Di Sulawesi Selatan ini, 3 kabupaten/kota yang telah disebutkan sebelumnya menjadi *mentee* (kabupaten/kota yang didampingi). Untuk Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare bermitra dengan mentor yakni Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Kota Palopo bermitra dengan Kabupaten Gresik. Kemitraan kabupaten/kota tersebut dilaksanakan berdasarkan tema permasalahan di wilayah *mentee*.

Di samping *mentor* dan *mentee*, nilai tambah selanjutnya dari program ini adalah tema atau topik yang didampingi setiap kabupaten/kota bisa berbeda. Hal ini tergantung kondisi eksisting setempat, aspek apa yang masih perlu didampingi untuk diperbaiki. Dalam skema program, ada 5 (lima) tema yang ditawarkan.

Kelimitya meliputi, tema 1 berupa kegiatan mendesain, mengoperasikan dan memelihara IPLT konvensional. Tema kedua mendesain, mengoperasikan dan memelihara IPLT mekanis, ketiga

perhitungan tarif dan kerjasama dengan swasta untuk LLTT, keempat mengelola pelanggan (termasuk *data base* pelanggan dan promosi/pemasaran) dan tema kelima adalah penguatan dan mempersiapkan institusi UPTD PAL baru untuk mengelola air limbah (tinja).

Adapun tema yang dipilih serta kemitraan antara *mentee* dan *mentor* termuat dalam tabel berikut :

No	Kabupaten/Kota Mentee	Topik/Tema	Mentor
1.	Kota Parepare	Topik1: mendesain, mengoperasikan dan memelihara IPLT konvensional.	Kabupaten Sidoarjo
2.	Kabupaten Pinrang	Topik 1: mendesain, mengoperasikan dan memelihara IPLT konvensional.	Kabupaten Sidoarjo
3.	Kota Palopo	Topik 5: penguatan dan mempersiapkan institusi UPTD PAL baru untuk mengelola air limbah	Kabupaten Gresik

Nilai tambah ketiga, adalah upaya tindak lanjut berupa pendampingan yang dilakukan paska kunjungan *mentee* ke daerah *mentor* dan sebaliknya. Metode *peer learning* antara *mentor* dan *mentee* dilakukan dengan saling berkunjung dan menyusun rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu menjadi fokus pendampingan *mentor* kepada *mentee*.

Nilai tambah keempat adalah kejelasan target dan *milestone* dalam pelaksanaan

program ini. Karena program *sharing* lainnya hanya bersifat penyebaran informasi dan pengalaman yang belum tentu dampaknya bisa terukur.

Sebelum pelaksanaan program, *Twinning Program* memiliki tahapan dan mekanisme yang harus ditempuh, baik oleh *mentee* maupun *mentor*. Gambaran tahapan dan mekanisme program *twinning* bisa terbaca dalam tabel berikut ini.

Tahapan Pelaksanaan Twinning Program



1 Identifikasi

- Topic
- Mentor
- Mentee
- Senior Services Provider
- Sponsor (jika ada)

2 Diagnostik

- Kesiediaan menjadi mentor
- Pemilihan topik oleh mentee
- Match mentor dengan mentee
- Match mentee dengan topik
- Menyusun rencana kerja, target yang akan dicapai, tahapan pelaksanaan, SDM dll.

3 MoU

- Penandatanganan kesepakatan bersama mentor, mentee dan sponsor (jika ada)

4 Implementasi

- Mentor dan mentee saling melakukan kunjungan
- Mentor mengadopsi *best practices* di lokasi mentor
- Mentor memberi masukan sesuai pengalaman yang dimiliki

5 Monitoring dan Evaluasi

- Mentor melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan
- SSP melakukan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kapasitas mentor dan mentee
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

Dalam setiap kegiatan kunjungan, sebagaimana disampaikan FORKALIM Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik, *mentee* mengunjungi *mentor* untuk mempelajari topik atau tema *twinning* yang dipilih, membandingkan dengan kondisinya sendiri, dan semua pihak setuju dengan metode *twinning* yang akan dijalankan untuk masing-masing *mentee*. Di antaranya adalah *time frame* dan tugas yang

akan diberikan saat kembali ke lokasi masing-masing *mentee*. Hal ini menjadi keunikan tersendiri dan nilai lebih yang dirasakan oleh kabupaten *mentee* maupun *mentor*.

Sedangkan saat *mentor* mengunjungi *mentee*, kegiatan yang dilakukan adalah mendiskusikan *progress* yang telah dicapai *mentee* kemudian memberikan penilaian



pada *mentee* sesuai kondisi dan menyesuaikan rencana pelaksanaan *twinning* saat dibutuhkan.

Pada kunjungan *mentee* yang kedua, *mentee* membagikan *progress* kemudian mendiskusikan masalah yang muncul dan menyetujui untuk menyelesaikan *twinning*. Sedangkan saat *mentor* kembali mengunjungi *mentee*, kegiatannya berupa mendiskusikan hasil akhir dan menemui manajemen/pemilik operator atau lembaga di atasnya (Pemerintah Daerah) untuk menyampaikan hasil dan menyetujui komitmen implementasi lebih jauh /memperluas hasil pelaksanaan *twinning*. Dalam skema program, semua proses

kegiatan itu berlangsung antara 6-8 bulan.

Tentu saja, inisiasi dan inovasi FORKALIM Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik ini layak didukung lebih lanjut oleh parapihak, utamanya terkait replikasi sebagai keberlanjutan program. Peserta yang kali ini menjadi *mentee* dapat menjadi *mentor* bagi kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan. Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan dapat menginisiasi program kemitraan seperti ini untuk kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Kota Palopo, Parepare dan Kabupaten Pinrang dapat dijadikan *mentor* bagi kabupaten/kota lain yang berminat menjadi *mentee*.



BANGKIT DARI KETIADAAN PANDUAN DAN SDM TANPA KEAHLIAN

Pembelajaran *Twinning Program* dari Pinrang

Keikutsertaan Kabupaten Pinrang (bersama dengan Kota Parepare) dalam *twinning program* adalah pendampingan untuk penguatan topik 1 yaitu mendesain, mengoperasikan dan memelihara IPLT konvensional. Sejatinya topik 1 hanya akan melakukan peningkatan fungsi pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) konvensional yang ada di wilayah *mentee*. Artinya, untuk Pinrang pendampingan akan bertujuan untuk meningkatkan fungsi teknis operasional IPLT Malimpung.

Namun dalam perjalanannya, berdasarkan kondisi faktual yang ada di wilayah *mentee*, pada akhirnya pembahasan tidak terbatas hanya pada aspek teknis IPLT saja. Apalagi diketahui bahwa aspek teknis tidak bisa terpisah dari aspek pendukung lainnya, seperti aspek kelembagaan, regulasi, keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan komunikasi serta advokasi. Seluruh aspek pada akhirnya butuh diperbaiki. Inilah salah satu poin penting dari upaya pengelolaan lumpur tinja yang integral dan berkelanjutan, yakni perlunya dukungan multiaspek.

Pinrang Sebelum *Twinning Program*; Mulai dari IPLT tanpa SOP Hingga SDM Nirketerampilan

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Malimpung di Kabupaten Pinrang seharusnya dapat berfungsi optimal. Apa pasal? Karena IPLT sudah dikelola oleh operator yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah (UPTD PAL), serta memiliki pegawai yang cukup, sebanyak 16 orang. Secara kelembagaan pun IPLT dan UPTD sudah berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kami bekerja tanpa SOP. Semua secara otodidak. Staf kami mengelola IPLT menurut kebiasaan. Jadi pengetahuan tim kami yang rendah ini berakibat pelayanan tak maksimal karena semua belum paham mengelola IPLT.”

Hardiman

Kepala UPTD PAL Kabupaten Pinrang

Tapi faktanya, IPLT yang dibangun tahun 2015 itu belum bisa berfungsi optimal. Jumlah antara lumpur tinja yang masuk dengan kapasitas IPLT tak seimbang. Pada bagian lain, kondisi bangunan dan pendukungnya tak terawat.

Apa yang disampaikan Hardiman menyiratkan, bahwa dukungan aspek kelembagaan itu rupanya tak cukup, akibat ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan IPLT. Sejumlah fakta di lapangan, yang menunjukkan kondisi IPLT dikelola tanpa SOP dan apa adanya adalah IPLT nampak kurang perawatan.

IPLT tidak pernah dibersihkan secara teratur, pembersihan kolam tidak dilakukan juga tidak adanya pengaturan aspek keselamatan pekerja. Bahkan termasuk hal



sederhana, misalnya ketiadaan papan nama IPLT dan papan nama di setiap unit kolam. Hal ini terlihat sederhana, namun sangat penting. Sayangnya, hal penting ini terlewatkan karena kondisi pegawai yang belum paham pentingnya keberadaan dan penerapan SOP.

Kondisi lain yang lebih teknis dan memengaruhi kualitas pengolahan lumpur tinja adalah tidak adanya unit pemisah padatan dan cairan, semua lumpur dari bak pengumpul masuk ke kolam *anaerob* melalui pintu air yang dibuka. Hal-hal ini tak

dipahami oleh petugas yang berjaga di IPLT, sehingga dibiarkan terus menerus.

Kondisi kolam yang ditumbuhi alga pun menjadi indikator minimnya perawatan dan pemeliharaan. Alga tumbuh di permukaan air terlalu banyak. Alga yang tumbuh banyak itu tentunya menjadi penghambat sinar matahari bisa menembus permukaan air dan sampai di dasar kolam. Kondisi ini pada akhirnya menghambat pengolahan.

Namun demikian, meski dengan kondisi ketiadaan pengetahuan dan keterampilan serta pembagian SDM yang tidak merata, pun ditunjang dengan kondisi IPLT yang tidak ideal, Hardiman menyatakan bahwa pelayanan pengelolaan air limbah domestik tetap berjalan. Dikatakan, dengan jumlah 2 unit armada mobil sedot tinja, sedikitnya 2 atau 3 rit lumpur tinja setiap hari dibuang dan diolah di IPLT Malimpung. Selain truk tinja milik pemerintah, belum ada ada truk tinja swasta yang membuang lumpur tinja di IPLT. Sedikitnya lumpur tinja yang masuk menyebabkan IPLT Malimpung hanya terisi sedikit lumpur tinja. Kondisinya masih jauh dari kapasitas atau daya tampung perharinya sebanyak 20 meter kubik.

Dikatakan Hardiman, IPLT Malimpung dibangun tahun 2015, bersamaan waktunya

dengan pembentukan UPTD PAL. Namun sejak dibangun hingga tahun 2020, kondisi layanan yang diberikan pihaknya tak juga meningkat. Adanya program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) tak juga banyak membantu.

Bahkan hingga akhir tahun 2019 lalu, kondisi kolam fakultatif IPLT secara teknis tidak berfungsi. Hal itu dikarenakan di bak pengumpul atau ekolisasi menggunakan pintu air dan terbuka, sehingga banyak padatan masuk ke kolam fakultatif.

“Akibat masuknya padatan itu, kolam fakultatif tidak dapat berfungsi maksimal karena padatan yang masuk tidak dapat dikelola di sana,”terang Hardiman.

Menurut Hardiman penyebabnya dikarenakan kemampuan SDM yang minim. Padahal jumlah SDM yang dimiliki UPTD PALD yang dipimpinnya dinilai mencukupi, yakni 16 orang. Mereka terdiri dari 3 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 13 orang lainnya tenaga honorer. Namun karena SDM itu tidak memiliki keahlian terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, khususnya operasional IPLT, maka jumlah yang mencukupi itu tak bisa memperbaiki layanan.

Selain itu, lanjut Hardiman, penempatan SDM juga tidak merata. Ada 5 orang di

bagian administrasi, 5 orang pembantu sopir, 2 orang sopir, sedangkan di IPLT hanya ada 1 orang. Keberadaan hanya 1 orang tenaga di IPLT inilah yang membuat kondisi IPLT Malimpung tak terawat. Bahkan pada beberapa bagian atau unit di IPLT sudah tak berfungsi dan mulai rusak seperti bak fakultatif.

Twining Program Memunculkan Harapan

Pada akhir tahun 2019, setelah menyatakan kesediaan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan lumpur tinja melalui *Twining Program*, Kabupaten Pinrang terpilih menjadi *mentee*. Program yang diinisiasi FORKALIM Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik ini memilih Pinrang bersama Kota Parepare bermitra dengan Kabupaten Sidoarjo sebagai mentornya. Pinrang masuk menjadi peserta program tersebut tak serta merta dipilih begitu saja, namun sebelumnya melalui asesmen dan beberapa tahap proses seleksi.

Pilihan topik 1 bagi Pinrang yaitu mendesain, mengoperasikan dan memelihara IPLT konvensional. menurut Hardiman sangat dibutuhkan mengingat kondisi IPLT Malimpung secara teknis mulai mengkhawatirkan. Selain itu, lanjutnya,



pihaknya sangat tertarik untuk mengikuti *twinning program* ini karena dirasakan pelayanan dan pengolahan belum efektif. Pihaknya tertarik untuk melihat wilayah lain yang pengolahan dan pelayanan lumpur tinjanya sudah bagus. Satu hal penting lainnya, menurut Hardiman, adalah mekanisme mentor dengan *mentee*, yang akan menjadikan proses pembelajaran efektif. Berbeda dengan banyak program lain yang biasanya massal dan tidak fokus.

Hardiman berharap, keikutsertaan Pinrang dalam *twinning program* ke depan akan

mampu mendongkrak pelayanan kepada masyarakat. Jika selama ini setiap tahun rata-rata UPTD PALD hanya melakukan penyedotan maksimal 300 kepala keluarga (KK), diharapkan setelah mengikuti *twinning program* akan mampu melayani sedikitnya 5.000 KK pertahun.

Jumlah 5.000 KK tersebut, menurut Hardiman, adalah daftar penyedotan yang masuk dalam program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) yang diterapkan Pinrang. Diakui, saat ini LLTT belum berjalan efektif dan baru menysasar penyedotan ke perkantoran saja. Oleh karena itulah, rencana besar LLTT itu diharapkan bisa terealisasi dengan semakin baiknya pelayanan sebagai dampak mengikuti *twinning program*. Di Pinrang, LLTT telah dirintis dan dimulai sejak akhir tahun 2018. Namun program layanan tersebut belum sesuai dengan yang direncanakan.

Harapan besar Pinrang yang disampaikan Hardiman dibawa ke Sidoarjo, saat kunjungan pertama *mentee* ke *mentor*. Sebanyak 5 orang dari Pinrang bersama 6 orang dari Parepare pada tanggal 22-23 Januari 2020 berkunjung ke Sidoarjo. Kunjungan itu didampingi perwakilan Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan serta UNICEF-Indonesia dan Yayasan BaKTI.



Pada kunjungan pertama itu, kegiatan dilaksanakan dengan diskusi di ruangan dan kunjungan lapangan. Dalam diskusi dibahas sejumlah tema mulai dari penekanan kegiatan *twinning program* topik 1 hingga sesi berbagi proses pencapaian UPTD PALD Sidoarjo.

Sebagai mentor, UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo berperan memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kedua *menteenya*. Itu pula yang dilakukan Kepala UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo, Indah Nursanti. Indah mengatakan, sarana pengolahan di IPLT

Griyomulyo menggunakan sarana pengolahan pertama atau bak penerima SSC (*solid separation chamber*). Jumlah SSC yang dimiliki sebanyak 12 bak, kemudian ada 1 kolam pengumpul, 8 kolam *anaerob*, 4 kolam fakultatif dan 5 kolam maturasi.

“Jadi IPLT kami modelnya masih konvensional,” tandas Indah.

Diterangkan pula, kapasitas IPLT Griyomulyo sebanyak 34,5 meter kubik



perhari. Kapasitas itu belum terpenuhi, karena setiap hari jumlah lumpur tinja yang masuk hanya sekitar 20 meter kubik per hari.

Indah juga mengungkapkan ikhtiar dan terobosan yang dilakukan guna mengoptimalkan fungsi IPLT dan UPTD PALD secara umum. Upaya dan terobosan itu di antaranya sosialisasi ke masyarakat perihal penggunaan tangki septik. Masyarakat juga diedukasi sampai pada kewajiban penyedotan lumpur tinja dari tangki septik di rumah mereka. Indah menyatakan, dalam melakukan sosialisasi pihaknya bekerja sama dengan program lain seperti IUWASH Plus dan juga sanitarian.

“Jadi tidak harus pihak kami sendiri yang melaksanakannya. Selain itu, pelaksanaan

sosialisasinya pun biasanya kami lakukan di beberapa acara dalam lingkup masyarakat misalnya di tengah ibu-ibu PKK. Intinya, kami selalu menyelipkan terkait pembicaraan masalah sanitasi,” ungkap Indah.

Diskusi juga memperlihatkan kondisi layanan UPTD PALD Sidoarjo dengan sejumlah inovasi lainnya. Hal ini penting agar kedua *mentee* bisa melihat proses, hasil dan capaian dari upaya perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan IPLT yang dilakukan dengan baik dan benar. Proses itu menghasilkan IPLT yang terpelihara dan berfungsi optimal, serta membawa dampak ikutan pada pelayanan yang berjalan sesuai harapan.

Kondisi teknis IPLT dan pelayanan lumpur tinja yang dipaparkan UPTD PALD Sidoarjo



sebagai *mentor* menjadi hal menarik bagi *mentee*. Peralnya, melalui pemaparan dan diskusi terkait strategi, pola dan mekanisme pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan IPLT yang dilakukan, *mentee* mendapatkan ilmu dalam pengoperasian IPLT sesuai SOP. Ilmu itu bisa diaplikasikan di daerah *mentee*, dengan modifikasi sesuai kondisi setempat.

Hari berikutnya di masa kunjungan itu, dilakukan peninjauan ke IPLT Griyomulyo.

Kunjungan lapangan ini menjadi ajang konfirmasi bagi ilmu yang telah didapatkan dalam diskusi di ruangan. Kunjungan ini juga melengkapi serta menempatkan imajinasi pada fakta lapangan melalui pengamatan langsung di IPLT. Ilmu semakin lengkap dan inspirasi serta motivasi *mentee* tumbuh kembali.

Kunjungan lapangan ke IPLT memperkaya pengetahuan *mentee* perihal pengolahan lumpur tinja di IPLT. Ilmu dari diskusi di



ruangan pada hari sebelumnya, berpadu dengan pengetahuan hasil pengamatan di lapangan. Pasca kunjungan lapangan, diskusi kembali dilakukan di ruangan. Perpaduan antara ilmu dan hasil pengamatan itu menumbuhkan rencana, menyemaikan keinginan untuk berbuat sesuatu. Rencana dan cita-cita tersebut diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Diskusi lebih lebih fokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan *mentee* sepulang dari Sidoarjo.

Fasilitator dan *mentor* memandu penyusunan RKTL. RKT disusun dengan menguraikan kondisi eksisting pengelolaan lumpur tinja di daerah *mentor* dan *mentee*.

Perbandingan kondisi kedua wilayah itu menjadi dasar rumusan permasalahan. Permasalahan itu akan diselesaikan dalam kegiatan dalam waktu yang ditargetkan. RKTL itu menyangkut aspek teknis di IPLT dan kelembagaan serta perencanaan. RKTL menjadi mandat yang harus dikerjakan *mentee* sebelum kunjungan balasan *mentor* untuk mendampingi *mentee*.

“Kami akan melakukan penyedotan lumpur yang ada di kolam anaerobik sehingga volume kolam tidak berkurang dan dapat berfungsi semestinya. Selain itu juga melakukan perbaikan pada bak pengumpul awal agar dapat mengurangi kandungan air pada lumpur tinja sebelum air masuk ke kolam *anaerob*. Juga pembuatan papan nama IPLT dan papan nama di setiap kolam,”kata Hardiman.

Di samping kegiatan-kegiatan jangka pendek dan mendesak tersebut, untuk perencanaan berikutnya, Hardiman menyatakan pihaknya akan menyusun SOP dengan terlebih dahulu mempelajari SOP yang dimiliki Sidoarjo. Selain itu ke depan juga akan mengusulkan pembangunan unit SSC melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020.

Sejumlah RKTL yang disusun tim dari Kabupaten Pinrang tergambar dalam tabel berikut ini:

No	UPTD PALD Sidoarjo	UPTD PAL Pinrang	Permasalahan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Output
I. IPLT						
1	IPLT dengan bak penerima berbentuk SSC	Bak penerima di IPLT hanya berbentuk bak pengumpul	Lumpur tinja yang masuk melalui bak awal (bak pengumpul) tidak dapat ditampung sehingga langsung masuk ke kolam anaerobik	<ol style="list-style-type: none"> Penyedotan lumpur yang ada di kolam anaerobik sehingga volume kolam tidak berkurang dan dapat berfungsi semestinya. Sudah ada mesin penyedotan lumpur Melakukan perbaikan pada bak pengumpul awal agar dapat mengurangi kandungan air pada lumpur tinja sebelum air masuk ke kolam anaerobik 	1 bulan di tahun 2020	Proses pemisahan padatan dan air optimal
2	Kondisi kolam anaerobik yang berfungsi sebagaimana mestinya	Kolam anaerobik tidak berfungsi sebagaimana mestinya	Adanya endapan lumpur yang terbawa dari bak pengumpul	<ol style="list-style-type: none"> Pengurusan dan evaluasi media filter di SSC Evaluasi letak posisi pipa outlet dari SSC sehingga lumpur tidak ikut terbawa ke bak anaerobik 	1 bulan di tahun 2020	Kolam anaerobik dapat berfungsi secara optimal
3	Memiliki SOP	SOP untuk OP di IPLT belum ada	IPLT dioperasikan dengan sistem kebiasaan	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun SOP prioritas yang harus ada di IPLT dengan berdasarkan pedoman dari Kementerian PU Mempelajari SOP yang dimiliki Sidoarjo 	6 bulan di tahun 2020	IPLT dioperasikan dengan SOP
4	Tersedia Sarana prasarana pendukung IPLT	Sarana prasana pendukung IPLT belum lengkap	Belum ada papan nama IPLT, papan nama setiap kolam, pagar halaman luar, pompa penguras lumpur	Pembuatan papan nama IPLT, papan nama setiap kolam	3 bulan di tahun 2020	Adanya papan nama IPLT, papan nama setiap kolam, pagar halaman luar, pompa penguras lumpur
II. PERENCANAAN						
1	SSC yang dimiliki berjumlah 12 unit	Merencanakan pembangunan bak SSC		Mengusulkan pembangunan unit SSC melalui skema APBD-P	2 tahun di tahun 2020 - 2021	Terbangunnya SSC sebagai unit penerima awal lumpur tinja untuk pemisahan padatan dan cairan
III. KELEMBAGAAN						
1	Memiliki staf yang cukup dan sudah terlatih	Memiliki keterbatasan staf dan belum ada pelatihan untuk operator	Staf bekerja secara otodidak karena belum pernah mendapatkan pelatihan	Mengikutsertakan staf dalam pelatihan ALD	6 bulan di tahun 2020	UPTD memiliki staf yang berkompeten sesuai bidangnya masing-masing

RKTL yang telah disusun *mentee* akan dibahas dalam diskusi dalam kunjungan *mentor* ke daerah *mentee*.

Catatan dari *Mentor*

Satu bulan pasca kunjungan *mentee* ke Sidoarjo, tiba giliran *mentor* melakukan kunjungan balasan. Kunjungan itu tentu, bukan sekedar lawatan biasa atau hanya sekedar berbalas kunjungan. Kesempatan itu digunakan *mentor* melihat fakta lapangan kondisi IPLT di daerah *mentee*, termasuk lebih jauh aspek terkait lainnya. Di samping itu juga untuk membahas RKTL yang telah disusun ketika *mentee* ke Sidoarjo. Ketika berkunjung ke Pinrang, mentor Sidoarjo didampingi tim FORKALIM, Pokja AMPL Provinsi Sulsel, UNICEF dan Yayasan BaKTI. Kegiatan itu berlangsung pada 24-25 Februari 2020.

Dalam kunjungan *mentor* ke *mentee* itu polanya diubah daripada saat kunjungan *mentee* ke *mentor*. Jika pada waktu ke Sidoarjo, *mentee* dan *mentor* berdiskusi dulu sebelum ke IPLT, maka saat *mentor* ke *mentee* kondisinya dibalik. Sehari sebelum diskusi, *mentor* dan tim yang hadir melakukan kunjungan terlebih dulu ke IPLT Malimpung.

Perubahan pola ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi di IPLT apakah sudah terjadi perubahan pasca *mentee* berkunjung ke *mentor*. Hal itu sekaligus melihat progres rencana jangka pendek yang disusun *mentee* dalam RKTL. Kunjungan pendahuluan ke IPLT itu juga dimaksudkan untuk mendapatkan bahan diskusi di ruangan esok harinya, agar saran dan rekomendasi sesuai dengan fakta di lapangan.

Saat pendampingan dalam kunjungan *mentor* ke daerah *mentee*, *mentor* melihat kembali progres RKTL. *Mentor* juga memberikan konsultasi dan asistensi teknis untuk hal-hal yang masih belum terlaksana atau kendala yang dihadapi..

Diskusi pada hari kedua kunjungan *mentor* itu dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Pinrang, Sarmico. Beberapa hal penting yang disampaikan di antaranya terkait rencana jangka pendek dan menengah pengoperasian IPLT Malimpung. Menurut Sarmico, Pinrang di masa mendatang akan mengembangkan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Namun rencana itu belum sepenuhnya bisa terlaksana karena masih adanya sejumlah tantangan yang dihadapi.

Tantangan itu di antaranya masalah teknis di IPLT berupa pemisahan padatan dan cairan lumpur tinja yang belum bisa dilakukan, belum adanya SOP di lingkup UPTD PAL dan di IPLT serta belum adanya program peningkatan kapasitas SDM.

“Untuk menemukan strategi penanganan ketiga hal tersebut, kami membutuhkan dukungan dari *mentor*. Misalnya, bagaimana agar praktik baik UPTD PAL Sidoarjo mengelola IPLT dan kelembagaannya dapat direplikasi di Pinrang,”harapnya.

Seolah menyambung harapan Sarmico, *Twinning Specialist* FORKALIM Zulfa Hanniawati, menyatakan bahwa Pinrang sudah mengalami kemajuan dengan mulai melaksanakan RKTL yang disusun pada waktu di Sidoarjo. Perubahan itu terlihat, misalnya, dari telah terpasangnya papan nama IPLT dan papan informasi di setiap kolam. Papan nama itu belum ada ketika Pinrang berkunjung ke Sidoarjo.

“Ini menandakan bahwa sudah ada hasil dari *twinning program* yang dilaksanakan. Nantinya ke depannya sisa kita perhatikan terkait dengan operasional, *maintenance*, dan yang lainnya,”ujar Zulfa memotivasi.

Kepala UPTD PALD Sidoarjo, Indah Nursanti juga mengapresiasi kerja-kerja yang

“Saya mengapresiasi teman-teman di Pinrang bisa terus mengoperasikan IPLTnya sedangkan di daerah-daerah lain itu sudah banyak yang menyerah. Di IPLT Malimpung masih ada upaya-upaya yang bisa diusahakan dan juga masih ada kegiatan operasional yang berjalan dan inilah yang patut kita apresiasi.”

Indah Nursanti

Kepala UPTD PALD Sidoarjo

dilakukan *mentee* Pinrang. Menurutnya, Pinrang masih terus beraktifitas mengoperasikan IPLT, meskipun beberapa kondisi memerlukan perbaikan. Menurutnya, semangat mengoperasikan itu modal penting bagi kemajuan pelayanan ke depan.

Indah mencatat, IPLT Malimpung memiliki beberapa perbedaan, di antaranya, lumpur tinja yang masuk langsung diterima oleh unit pemekatan atau bak pengumpul. Setelah dari bak pengumpul seharusnya dialihkan ke bak biologis. Di bak biologis ini ada bak anaerobik, fakultatif, dan maturasi.

Di IPLT Malimpung, kata Indah, pemisahan antara lumpur dan padatan di bak pemekatan belum terjadi secara sempurna. Hal itu menurutnya, dapat dilihat dari warna pipa anaerobik yang masih hitam pekat dan menandakan bahwa lumpur itu masih mendominasi. Sehingga pada bak maturasi itu belum maksimal, sebab diproses di awal masih belum bisa menguraikan semuanya.

“Seandainya bak pengumpul yang ada berfungsi sesuai dengan desainnya, yakni mengeluarkan *overflow* ke bawah, mungkin masih bisa untuk dioptimalkan. Fungsi terpenting dari IPLT adalah memisahkan antara padatan dan cairan. Permasalahan yang ada di IPLT Malimpung ini adalah bahwa pemisahan antara padatan dan cairan belum sempurna,” tandasnya.

Indah juga menyampaikan, kondisi ini terjadi karena masih kurangnya perawatan IPLT Malimpung. Hal itu sebagaimana pernah disampaikan di Sidoarjo oleh *mentee*, terjadi karena SDM yang tidak paham pekerjaannya dan ketiadaan SOP.

Hal ini juga diakui oleh Hardiman, di mana SDM yang mengelola IPLT belajar otodidak. Menurut Indah, terkait SDM harus diperjelas kembali tugasnya. Sebab meskipun SDM di UPTD PALD Pinrang cukup, namun

pembagian tugasnya belum jelas dan belum sesuai fungsinya.

Sebagai *mentor*, Indah Nursanti tak hanya memberikan catatan hal-hal yang masih kurang, namun juga memberikan solusi. Indah menyarankan agar membuat *buffer* di bak penampung sehingga dapat menahan lumpur secara permanen. Lebih lanjut, ujarnya, bak penampung perlu dipasang *outlet* agar pemisahan antara cairan dan padatan dapat berlangsung sempurna. Sedangkan untuk bak pengumpul, Indah menyarankan agar desainnya dibuat *overflow*.

Terkait ketiadaan SOP, Indah juga menyarankan agar *mentee* segera melakukan penyusunan SOP. SOP yang dibutuhkan ada dua macam yaitu SOP yang saat ini harus dikerjakan atau sifatnya mendesak dan SOP yang ke depannya saat sistemnya sudah SSC. SOP ini nantinya akan ditanda tangani oleh Kepala Dinas karena Kepala Dinas harus tahu apa yang dikerjakan di IPLT.

Sementara itu untuk pembagian kerja SDM, Indah menyampaikan sebaiknya ada pembagian tugas SDM seperti untuk bagian penyedotan, administrasi keuangan, administrasi pengolahan data, pembina



KSM, dan yang lainnya. Terkait SDM Indah optimis akan memberi kontribusi berarti dalam perbaikan operasional IPLT ke depan. Menurutnya, kapasitas IPLT saat ini sebesar 20 meter kubik per hari dan belum optimal pengelolaannya salah satunya karena belum optimalnya SDM.

Sebelum diskusi di hari kedua itu diakhiri, sambil kembali sama-sama melihat RKTL yang disusun di Sidoarjo, catatan penting lainnya adalah perlunya pelatihan bagi SDM yang dimiliki. Karena secara kuantitas

sudah memiliki potensi, tinggal melengkapinya dengan kualitas keahlian mereka. Pada saat pendampingan dua hari akan berakhir, *mentor* dan *mentee* menyusun kembali RKTL kedua untuk dikerjakan *mentee*. Disepakati juga rencana dan waktu pendampingan kedua sampai dua kali kunjungan.

Sejumlah catatan perubahan dan rekomendasi yang dihasilkan sejak kunjungan *mentee* ke *mentor*, lalu *mentor* berkunjung ke Pinrang di antaranya adalah:

<input checked="" type="checkbox"/> Pembuatan papan nama IPLT dan papan nama setiap kolam.	<input checked="" type="checkbox"/> Mempelajari SOP yang dimiliki Sidoarjo.
<input checked="" type="checkbox"/> Pengurasan secara bertahap pada bak pengumpul, kolam anaerob dan kolam fakultatif. Karena sudah ada mesin penyedotan lumpur, pekerjaan pengurasan mulai dilakukan pada Sabtu, 29 Februari 2020.	<input checked="" type="checkbox"/> Mengusulkan pembangunan unit SSC di tahun 2020 - 2021. <input checked="" type="checkbox"/> Mengikutsertakan staf dalam pelatihan PALD.
<input checked="" type="checkbox"/> Melakukan perbaikan pada bak pengumpul awal agar dapat mengurangi kandungan air pada lumpur tinja sebelum air masuk ke kolam anaerob.	<input checked="" type="checkbox"/> Menugaskan "Pembantu Supir" untuk mem-back up kegiatan di IPLT, di antaranya untuk pencatatan lumpur masuk ke IPLT, pengawasan pembuangan lumpur di IPLT, pembersihan <i>bar screen</i> , pengambilan ganggang di kolam stabilisasi, dll.
<input checked="" type="checkbox"/> Ada 4 alternatif yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan seminimal mungkin melakukan perombakan pada bangunan yang sudah ada, kemudahan operasional, dan biaya, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembersihan pada <i>bar screen</i> (2) Pemasangan baffle pada bak pengumpul. (3) Pemasangan bak kontrol sebelum pipa outlet dari bak pengumpul (4) Mematikan pintu air, dan membuat pipa outlet dengan ketinggian tertentu untuk mengeluarkan cairan yg sudah terpisah dari padatan (biasanya terjadi pada hari ke-3). 	<input checked="" type="checkbox"/> Rekomendasi agar kapasitas SSC yang dibutuhkan, ditentukan berdasarkan prioritas pelayanan dan ketersediaan lahan yang ada. <input checked="" type="checkbox"/> Perbaiki SOP operasional IPLT, pengaturan ulang waktu kerja dan jumlah SDM operator IPLT serta pencatatan lumpur masuk di IPLT.

Sementara untuk waktu jangka menengah IPLT Pinrang membutuhkan pembangunan bak SSC (*Sludge Separation Chamber*). Menurut Indah, kebutuhan Pinrang untuk pembangunan SSC cukup penting. Hal ini karena kondisi bak pengumpul saat ini sudah tidak optimal memisahkan padatan dan cairan.

Twinning Program Menggugah Kebersamaan

“Terus terang selama ini saya memiliki pemahaman, kalau pengelolaan air limbah domestik bukan ranah saya. Walaupun ada juga memang tugas tanggung jawab di ranah sanitasi, tapi pengolahan langsungnya kan memang di UPTD. Di twinning program ini kami dilibatkan sehingga paling tidak kami akhirnya memiliki perhatian. Twinning program menumbuhkan kebersamaan, kerja bersama di antara kami.”

Harman

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR
Kabupaten Pinrang

Setiap proses melahirkan hasil. Hasil tidak selalu berwujud perubahan mendadak dan besar atau langsung menjadi sesuatu yang baru. Hasil dari sebuah proses bisa berupa perubahan pola pikir, perubahan perilaku dan pengetahuan atau kesadaran baru.

Dalam proses mengikuti *twinning program*, Hardiman mengungkapkan, hasil yang

didapatnya adalah pembelajaran pada proses, peningkatan pengetahuan dan tumbuhnya motivasi pada dirinya. Hardiman mengatakan, inovasi yang dilakukan *mentor* memotivasi pihaknya untuk bisa memperbaiki kondisi IPLT dan membenahi manajemen pengelolaan lumpur tinja di daerahnya menjadi lebih baik. Pelajaran lain yang didapatkan adalah bagaimana melakukan pengelolaan lumpur tinja dengan benar sesuai SOP.

“Sejauh ini kami dapat banyak pelajaran dari cara pengolahan limbah domestik yang baik. Salah satunya adalah kebutuhan adanya SOP. Dan kami akan susun SOPnya,”ujarnya optimis.

Pembelajaran yang sangat mengesankan bagi pihaknya, lanjut Hardiman adalah penambahan pengetahuannya terkait pengolahan lumpur tinja di IPLT. Dulu, katanya, dia tidak memperhatikan pengolahan di IPLT secara detail. Bahkan pelaksanaan tes *efluen* untuk kandungan COD (*Chemical Oxygen Demand*) dan BOD (*Biological Oxygen Demand*) belum pernah dilakukan. Pekerjaan juga dilakukan serampangan dan tidak teratur. Hal-hal itu kini sedikit demi sedikit telah dibenahi agar bisa efektif.



Pengakuan mendapatkan pembelajaran juga disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pinrang, Harman. Dia mengakui mendapatkan pembelajaran menarik, di mana pihaknya dilibatkan dalam pengelolaan air limbah domestik. Diakui, selama ini, dikesankan bahwa pengelolaan air limbah domestik bukan ranah pekerjaan bidangnya. Pekerjaan itu seolah-olah hanya tugas dan kewajiban UPTD saja. Akibatnya, sebagaimana diakui, pihaknya selama ini

kurang memberikan perhatian pada persoalan air limbah domestik.

Harman memberikan apresiasi kepada *twinning program* atas pelibatan pihaknya itu. Proses pembelajaran itu, lanjutnya, mendorong pihaknya memaksimalkan layanan dengan cara kerja bersama pihak terkait. Selain Dinas PUPR, sekarang ini dukungan juga didapatkan dari OPD lainnya, misalnya saja Bappeda. Hal itu selama ini tidak terjadi dan UPTD PALD selama seolah-olah berjalan sendiri.



MEMBENAHAI IPLT DAN MENCARI INDUK BARU UPTD

Proses *Twinning Program* untuk Peningkatan Layanan di Parepare

Menurut dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Parepare tahun 2019, kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Alopoe sebesar 50 meter kubik perhari. Sampai akhir tahun 2019, kapasitas sebesar itu tak pernah terisi penuh. Jumlah lumpur tinja yang masuk hanya berkisar 6-8 meter kubik perhari. Asupan lumpur tinja yang kurang, secara teknis tidak menguntungkan bagi operasional IPLT.

Sejumlah upaya untuk meningkatkan jumlah buangan lumpur tinja ke IPLT sudah ditempuh. Kebijakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) telah disampaikan ke masyarakat. Respon masyarakat atas program itu positif. Kesadaran masyarakat menguras tangki septiknya meningkat. Jumlah permintaan penyedotan melonjak tajam. Sayangnya, kesiapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD PALD) sebagai operator penyedotan tinja dan mengelola IPLT, tak berbanding lurus dengan permintaan warga. Data di UPTD PALD menyebutkan, setidaknya 200 kepala keluarga (KK) menunggu antrian penyedotan. Pihak UPTD PALD kewalahan.

Kepala UPTD PALD Kota Parepare, Haeruddin menyebutkan, minimnya jumlah karyawan serta sarana dan prasarana pendukung menjadi penyebab pihaknya belum mampu memenuhi permintaan penyedotan dari warga. Hal itu juga berakibat tak berfungsinya sarana dan prasarana sesuai SOP (*Standar Operasional Prosedur*). Akibat lebih jauh, truk tinja dan atau IPLT pun tak dapat berfungsi optimal.

“Waktu UPTD PALD terbentuk tahun 2014 saya langsung bertindak cepat dengan mengusulkan pada pimpinan untuk

menambah SDM. Tetapi sampai sekarang kenapa tidak ada, sampai sekarang tidak pernah direspon. Dari dulu tahun 2014 sampai sekarang, Pak, tidak ada respon itu permintaan SDM,” ujar Haeruddin, suatu siang.

Bermula di SDM, Berujung ke IPLT



Terkait persoalan SDM, Haeruddin mengaku telah menghitung dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Dia menyebut, untuk mengelola UPTD PALD dengan memfungsikan sarana dan prasarana seperti truk sedot tinja dan IPLT

dibutuhkan setidaknya 20 orang. Kebutuhan itu tak pernah terpenuhi. Sampai kini UPTD yang dipimpinnya hanya dioperasikan oleh 5 orang.

Dengan susunan struktur Kepala UPTD, 3 orang di IPLT dan satu orang mengoperasikan truk tinja. Menurut Haeruddin, jika ada permintaan penyedotan tinja dia menarik 1 orang operator di IPLT untuk membantu tenaga di mobil sedot tinja. Kurangnya tenaga inilah, pangkal masalah dari tak berjalannya semua unit di UPTD sesuai SOP.

“Kami sekarang sudah ada SOP tapi pelaksanaan di lapangan itu tidak bisa sesuai dengan SOP, karena jumlah SDM yang kurang. Saya yang ikut rapat atau pertemuannya, saya juga nanti penyelesaiannya. Bagaimana kita akan melaksanakan SOP ini kalau tidak ada SDM?” tanyanya.

Jika kondisi ini terus berlarut, Haeruddin berkeyakinan, IPLT Alopoe lama kelamaan akan rusak. Ia mengatakan, saat ini kerusakan mulai terjadi di beberapa bagian. Kondisi tangki *imhoff*, misalnya, saat ini keadaanya tak sesuai ketentuan. Di samping itu beberapa kolam memiliki beban pengolahan yang tidak merata. Ada

yang penuh dan di sisi lain ada kolam yang kosong. Kolam fakultatif di sana juga tidak berfungsi. Pun ada bak penampungan yang tak memiliki saluran pembuangan. Lama kelamaan, kata Haeruddin, jika terus dibiarkan maka kondisi akan semakin parah.

Dalam kesempatan itu, Kepala Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan Bappeda Parepare, Abdul Muis menyatakan, benar bahwa Haeruddin sudah mengajukan penambahan SDM untuk UPTD. Namun dikatakan, Pemkot Parepare belum bisa memenuhi permintaan itu disebabkan sejumlah kendala internal. Namun demikian, pihaknya sudah mengkomunikasikan hal itu kepada pimpinan.

Hal hampir senada ditambahkan Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan SDA Bappeda Parepare, Andi Talhayanti. Menurutnya, Pemkot Parepare sebelum merespon permintaan penambahan SDM untuk UPTD, berbagai prosedur harus dilakukan terlebih dahulu, semisal proses analisis jabatan (Anjab). Pihaknya mendukung penambahan SDM, apalagi jika *twinning program* merekomendasikan adanya penambahan SDM dimaksud.

Twinning Program: Saling Kunjung dan Berbagi Pengalaman untuk Perbaikan

Di tengah kondisi pelayanan yang apa adanya dan asal berjalan itu, kepada Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang mendapat tawaran mengikuti *twinning program*. Bagi kedua wilayah, penawaran program ini tak ubahnya menemukan oase di padang gersang. Ketika tawaran itu datang, Haeruddin serta merta sangat antusias menerima.

Menurutnya, inilah saatnya dia dan UPTD PALD yang dikelolanya akan berubah.

Pasalnya, program yang ditawarkan memuat hal baru yang belum pernah didapat sebelumnya. Model pembelajaran yang akan dilaksanakan di *twinning program* adalah menjalin kemitraan dengan operator air limbah domestik di wilayah lain yang kondisi IPLT dan pelayanan air limbah domestiknya lebih baik.

Menurut Haeruddin, dalam proses penawaran program, FORKALIM Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik bersama UNICEF dan Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan memberikan 5 opsi topik atau tema



yang akan dikerjasamakan. Dari kelima topik yang ditawarkan, pihaknya sangat tertarik untuk memilih topik 1. Mengingat topik ini sangat relevan dengan keadaan di Parepare. Karena itu dia bersama *stakeholders* di Parepare akhirnya memilih topik tersebut.

“Jadi di awal dari *twinning program* tersebut kami diperkenalkan untuk memilih topik yang bisa kita laksanakan. Ada 5 topik yang diperkenalkan kepada kami. Kami langsung pilih topik kesatu yaitu mendesain, mengoperasikan dan memelihara IPLT

konvensional. Karena memang kebutuhan kami itu, di samping SDM yang rendah,”kata Haeruddin.

Dikatakan Haeruddin, salah satu pertimbangan teknis yang melatari pemilihan topik 1 berkaitan dengan kondisi IPLT Kota Parepare. Menurutnya, IPLT Alopoe menggunakan sistem *imhoff tank* alias IPLT konvensional. Kondisi pada saat ini pemanfaatan IPLT tidak berjalan optimal. Hal ini terjadi karena banyak sebab, namun secara teknis di antaranya adalah adanya persoalan pada tidak berfungsinya *imhoff tank*.



Haeruddin menandakan, untuk pelayanan yang baik maka kondisi di IPLT konvensional terlebih dulu harus bagus, tidak boleh tidak. Kalau IPLT bagus, maka akan bagus semuanya.

Sisi lain penerimaan Parepare pada *twinning program* disampaikan sejawat Haeruddin dari Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (Pokja AMPL), Andi Talhayanti. Dia mengatakan, *twinning program* sangat baik untuk meningkatkan kapasitas di IPLT yang mereka miliki. Terlebih dengan adanya mekanisme pembelajaran langsung dari *mentor*, akan mempermudah pihaknya menerapkan model pengelolaan IPLT yang benar.

“Karena kami melalui program ini akan mendapat pembelajaran langsung dari Sidoarjo dan terus dibimbing, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas di IPLT kami. Jadi nantinya IPLT di Parepare harus berfungsi dan beroperasi semaksimal mungkin,”harapnya.

Harapan Parepare tak bertepuk sebelah tangan, karena dinyatakan terpilih menjadi *mentee* untuk topik 1. Sama seperti Pinrang, *mentor* yang akan membantu Parepare adalah UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan desain

twinning program, di mana dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan, wilayah lain yang kondisi teknis IPLT dan pelayanannya lebih baik akan menjadi *mentor* bagi *mentee*. Kondisi UPTD PALD Sidoarjo dinilai lebih baik dan telah siap menjadi *mentor* untuk Pinrang dan Parepare.

Sebagai *mentee* yang memiliki kesamaan topik dengan Pinrang, tim dari Kota Parepare berangkat bersama dengan Tim dari Kabupaten Pinrang untuk mengunjungi Sidoarjo. Ini adalah awal pelaksanaan *twinning program*, yang dimulai dengan melakukan kunjungan *mentee* kepada *mentor*. Kunjungan bersama itu dilakukan pada tanggal 22-23 Januari 2020.

Dalam diskusi hari pertama, Rabu 22 Januari 2020, *Senior Service Provider* (SSP) FORKALIM, Serindit Indraswari mengingatkan bahwa selain membahas persoalan teknis IPLT, ada topik lain yang akan dibahas bersama. Topik itu ialah penguatan operator IPLT pada lokasi *mentee*, seperti bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan SOP yang telah disusun. Selain itu juga diharapkan bagaimana *mentee* mengatasi masalah yang dihadapi pada IPLT yang kurang



optimal. “Apakah IPLT yang kurang optimal itu penyebabnya karena kurang pasokan atau ada masalah terkait operasional teknologinya. Kemudian, topik lainnya kita akan menyusun RKTL ke depan untuk mengoptimalkan IPLT,” tandas Serindit, atau akrab disapa Didit.

Didit menyatakan, selain kunjungan pertama *mentee* ke *mentor* itu, ke depannya akan ada beberapa pertemuan lagi. Setelah *mentee* bertemu dengan *mentor* di Sidoarjo, kemudian nanti akan ada saatnya *mentor* akan berkunjung ke *mentee* di Parepare untuk melakukan *follow up*. Diharapkan,

lanjut Didit, *output* yang dihasilkan *mentee* selama kunjungan itu akan menghasilkan draf rencana kerja dan tindak lanjut (RKTL).

Draf RKTL akan dikelola sendiri oleh *mentee* untuk jangka waktu 1 sampai 3 tahun atau bahkan hingga 4 tahun ke depan. Draf RKTL itu akan dibahas dalam pertemuan pada saat mentor berkunjung ke lokasi *mentee*. Pertemuan juga diharapkan untuk melakukan uji coba SOP.

Didit juga menjelaskan, setelah kunjungan *mentee* ke *mentor*, *mentee* akan kembali berkunjung ke mentor untuk membicarakan

pembahasan yang lebih spesifik terkait optimalisasi IPLT yang berhubungan dengan bidang teknologi.

“Jadi pertemuan hari ini dan pertemuan ke depan di lokasi *mentee* kita akan lebih banyak fokus pada SOP dan operasional bangunan yang sudah ada. Lalu pada pertemuan berikutnya di mana *mentee* kembali berkunjung ke mentor jika ada yang ingin meng-*upgrade* IPLT-nya, kita akan lebih detil dibahas pada pertemuan tersebut, misalnya apakah teknologinya akan tetap konvensional ataukah ingin ada mekanisasi,”katanya.

Parepare dalam proses kunjungan itu, di samping mendapatkan ilmu dalam ruang diskusi, juga melakukan kunjungan lapangan ke IPLT Griyomulyo. Dua hari berproses, kunjungan *mentee* kepada *mentor* itu menghasilkan sejumlah *output* terkait dengan pembelajaran. Hal itu didapat setelah berdiskusi dan melihat kondisi IPLT Griyomulyo Sidoarjo. Ilmu diserap, keunggulan *mentor* dicatat dan mencoba menerapkan pada kondisi IPLT di kota sendiri. Lalu *mentee* diminta menyusun RKTL.

Haeruddin mengatakan, hal-hal mendesak di IPLT yang bisa langsung diperbaiki di antaranya adalah pemasangan atap unit

pengering di unit *sludge drying bed* (SDB), perbaikan *outlet imhoff tank* dan pemasangan pagar pembatas antar TPA dan IPLT serta pemasangan papan nama permanen setiap kolam/unit.

Dikatakan, persoalan mendesak di Parepare pada akhirnya terkuat satu persatu. Persoalan itu tidak saja terkait dengan minimnya jumlah dan kualitas SDM pengelola, namun juga terkait dengan hal-hal teknis lainnya. Baik terkait kondisi IPLT ataupun sarana lainnya. Berbagai persoalan itu bertumpuk yang pada akhirnya memengaruhi kinerja layanan pengolahan.

Berbagai persoalan itu dituangkan dalam RKTL yang disusun Parepare. Dalam RKTL tidak hanya membuat rencana hal-hal terkait SDM saja, namun hal-hal teknis lain yang saling memengaruhi. Di antaranya beberapa aspek pendukung pengoperasian IPLT seperti SOP, perbaikan teknis di IPLT dan aspek lainnya.

RKTL yang dihasilkan Tim Parepare adalah sebagai berikut.

No	UPTD PALD Sidoarjo	UPTD PAL Parepare	Permasalahan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Output
I. IPLT						
1	IPLT dengan bak penerima berbentuk SSC	IPLT dengan bak penerima awal <i>imhoff tank</i>		Perlu nya buka tutup pipa outlet lumpur secara berkala agar tidak terjadi penyumbatan		Proses pemisahan padatan dan air optimal
2	Memiliki SOP	SOP untuk OP di IPLT sudah ada	IPLT dioperasikan dengan sistem kebiasaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP prioritas yang harus ada di IPLT dengan berdasarkan pedoman dari Kementerian PU 2. Mempelajari SOP yang dimiliki Sidoarjo 	6 bulan di tahun 2020	IPLT dioperasikan dengan SOP
3	Sarana prasana pendukung IPLT ada	Sarana prasana pendukung IPLT belum lengkap	Belum ada papan nama IPLT, papan nama setiap kolam dan pagar halaman luar	Pembuatan papan nama IPLT, papan nama setiap kolam dan pagar halaman luar baik dengan dana APBD-P	3 bulan di tahun 2020	Adanya papan nama IPLT, papan nama setiap kolam, dan pagar halaman luar
II. PERENCANAAN						
1	Unit <i>drying bed</i> yang memiliki atap	Unit SDB yang tidak tertutup atap	Dengan kapasitas lumpur yang masuk 6 - 8 m ³ hanya dan hanya ada 1 unit SDB saat ini belum ada masalah, namun jika LLT sudah jalan maka akan menjadi kendala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pembangunan atap pada SDB melalui skema 2. Merencanakan penambahan unit SDB melalui skema APBD 	6 bulan di tahun 2020	SDB dapat berfungsi sebagaimana mestinya
III. KELEMBAGAAN						
1	Memiliki staf yang cukup dan sudah terlatih	Memiliki keterbatasan staf dan belum ada pelatihan untuk operator	Formasi yang masih kosong pada UPTD dan perlunya pelatihan untuk staf dalam operasional IPLT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebutuhan Anjab 2. Rekrutmen personil (ASN/non 3. Memfasilitasi staf UPTD mengikuti program pelatihan seperti pelatihan di Balai Pelatihan Teknis PLP atau dengan UPTD lainnya 	2 tahun di tahun 2020 - 2021	Formasi personil dalam UPTD lengkap dan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM di UPTD

Catatan dari *Mentor*



Mentor UPTD PALD Sidoarjo tiba di Parepare pada tanggal 26-27 Februari 2020. Kunjungan dua hari *mentor* dan tim dimanfaatkan dengan melakukan kunjungan ke IPLT Aloppoe di hari pertama. Lalu di hari kedua, diskusi dilakukan di ruang rapat Bappeda dan dihadiri 12 orang peserta.

Dalam diskusi, *Twinning Specialist* FORKALIM Zulfa Hanniawati, mengungkapkan hal yang menurutnya “melenceng” dari topik 1 twinning program yang dijalani Parepare. Hal itu terkait kelembagaan UPTD PALD yang masih berada di Dinas Lingkungan Hidup. Menurut Zulfa, mungkin ada beberapa pertanyaan kenapa posisi itu dipertanyakan dan harus dipindahkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih tepat. Hal ini menurutnya penting karena ke depan ada kaitannya dengan kebutuhan SDM dan juga kebutuhan pendanaan.

Terkait posisi kelembagaan ini, Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan SDA Bappeda Parepare, Andi Talhayanti menyampaikan bahwa saat ini sudah ada nota dinas pimpinan terkait posisi UPTD PALD ke depan. Diakui saat ini terjadi dualisme anggaran antara Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup. Hal itulah yang membuat dukungan anggaran untuk UPTD selama ini tidak optimal.

“Perlu ada upaya pemindahan UPTD PALD ke Dinas PU. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada bahwa untuk air limbah domestik dikelola oleh Dinas PU atau nama lain dan air limbah non domestik di bawah Dinas Lingkungan Hidup,”

Zulfa Hanniawati

Twinning Specialist FORKALIM

“Namun Insya Allah sesuai juga dengan Permendagri 90 dan terkait dengan SPM keciptakaryaan, kemungkinan besar UPTD PALD akan dipindahkan ke Dinas PUPR,” tandas Andi Talha.

Pemindahan UPTD PALD dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas PUPR juga akan mendukung persoalan kekurangan SDM. Pasalnya, penambahan SDM baru dapat dilakukan jika UPTD PALD telah berada di bawah Dinas PUPR. Hal ini karena terkait dengan rekening anggaran yang berada di bawah Dinas PUPR.

Setelah sedikit membahas kelembagaan, diskusi kemudian berlanjut ke pembahasan teknis IPLT. Bahasan teknis ke-IPLT-an disampaikan *mentor*, Indah Nursanti. Kepala UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo ini menyampaikan bahwa unit pemisahan antara padatan dan cairan di IPLT Alopoe tidak sesuai dengan standar teknis. Menurutnya, *imhoff tank* yang saat ini ada hanya terdiri dari satu bak besar sehingga pemisahan lumpur dan padatannya tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Oleh karena itu, lanjutnya, fungsi *imhoff tank* itu jika hanya sebagai bak pengendapan terlalu besar.

“Di atas *imhoff tank* sendiri ada saringan yang diameter saringannya terlalu besar

sehingga hanya bisa menyaring sampah besar saja. Jadi kalau memang ini mau dioptimalkan untuk unit pra-pengolahan maka perlu untuk mengganti saringannya dengan ukuran yang lebih kecil dan bahannya dipilih yang memang anti-oksidasi,”katanya.

Indah juga menyoroti fungsi kolam-kolam yang ada mulai dari anaerobik, fakultatif hingga ke kolam maturasi. Menurutnya, ada ketidakberfungsian pipa dari *imhoff tank* ke bak anaerobik. Dikatakan, secara desain sebenarnya ada dua pipa. Pipa atas yang mengeluarkan cairan setelah pengendapan dan masuk langsung ke bak anerobik. Kemudian ada juga pipa bawah. Namun, ujarnya, yang terlihat dalam kunjungan sehari sebelumnya, pengeluaran hanya terjadi di pipa bawah. Sehingga di bagian pinggir bak anerobiknya terlihat banyak sekali lumpur.

“Di bagian tengah itu akan lebih banyak lagi. Kedalaman lumpurnya itu lebih dari satu meter dan sebenarnya menandakan bahwa proses pemisahan padatan dan cairan belum efektif,”kata Indah.

Menurut Indah, masalah pengolahan juga masih terjadi di kolam atau bak berikutnya yakni bak fakultatif dan maturasi. Indah menemukan di salah satu bak fakultatif ada



yang kosong, itu merupakan indikasi kebocoran terjadi di bak tersebut. Demikian pula adanya salah satu kolam maturasi yang kosong, yang menandakan adanya pengolahan yang tidak memenuhi standar teknis.

Terkait dengan rencana Parepare membangun SSC sebagaimana dimasukkan dalam RTL, Indah mengingatkan agar dipertimbangkan kemungkinan bisa tidaknya membangun SSC sesuai dengan kapasitas dan kondisi kolam-kolam yang ada sekarang. Indah menyarankan agar Parepare mengoptimalkan kondisi IPLT sekarang, sambil menunggu pembangunan SSC.

Hal yang sama ditekankan oleh Serindit Indraswari. Menurutnya, timnya

merekendasikan kepada *mentee* agar mengoptimalkan IPLT yang sekarang. Walaupun *imhoff tank* sudah tidak sesuai syarat teknis, namun hal itu bisa dimanfaatkan dengan penambahan satu kolam lagi di depan untuk meletakkan saringan.

“Kalau memungkinkan kita buat lagi satu kolam, tidak usah besar dan dalam tapi bisa untuk menaruh saringan. Jadi yang kita perbaiki adalah agar pasir dan sampah besar tidak masuk,” tandas Serindit.

Selain hal-hal yang telah disampaikan, baik mentor maupun FORKALIM Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik memberikan catatan lainnya untuk kondisi IPLT Alopoe. Catatan itu misalnya saja

bahwa kualitas efluen pada *outlet* tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 tahun 2016. Selain itu, seperti telah dijelaskan bahwa *imhoff tank* sebagai unit pemisahan padatan dan cairan kurang efektif karena tidak ada zona pengendapannya. Ada juga catatan terkait dengan adanya turbulensi pada saat pembuangan lumpur dari truk tinja ke *imhoff tank*. Hal ini menyebabkan lumpur yang sudah mengendap terangkat kembali.

Catatan lainnya yang disampaikan adalah, jarak antara batang/*mesh* pada saringan pada *imhoff tank* terlalu besar. Hal ini mengakibatkan sampah yang terbawa dalam tangki masih bisa masuk ke dalam *imhoff tank*. Selain itu juga adanya penyumbatan pada pipa *efluen* (atas) pada *imhoff tank*.

Kondisi lainnya yang terlihat adalah kolam *anaerob* penuh lumpur. Kolam fakultatif dan maturasi terlalu penuh tertutup ganggang. Hal itu sebaiknya dikurangi dengan cara diambil menggunakan jaring. Terlihat pula kolam fakultatif 1 dan maturasi 1 hampir luber. Hal ini merupakan indikasi penyumbatan pada pipa *outlet*. Hal yang penting disampaikan pula adalah bahwa tidak ada badan air penerima atau saluran drainase untuk mengalirkan *efluen* dari kolam maturasi.

Sebagai penutup, Indah Nursanti juga menyampaikan hal non teknis seperti belum optimalnya penerapan SOP. Baik SOP administrasi maupun SDM.

“Manajemen *marketing* menurut kami juga belum maksimal. Selain itu kekurangan SDM sangat terlihat, misalnya saja call center ditangani Kepala UPTD. Jumlah SDM operasional yang kurang. Ini semua aspek non teknis namun berdampak ke teknis khususnya terkait perawatan IPLT,” tandasnya.

Pada diskusi juga juga dibahas RKTL yang disusun ketika *mentee* di Sidoarjo satu bulan sebelumnya. Sejumlah perubahan dan perbaikan telah dilaksanakan dalam waktu satu bulan itu di antaranya, pemasangan papan nama IPLT dan papan nama setiap kolam. Selain itu, setelah melakukan kunjungan ke IPLT, didapatkan permasalahan lain yang berhasil diidentifikasi dan akan diselesaikan. Temuan permasalahan dan rencana penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel.

No	UPTD PALD Sidoarjo	UPTD PAL Parepare	Permasalahan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Output	Output dan Rekomendasi pada Trip 2
I. IPLT							
1	IPLT dengan bak penerima berbentuk SSC	IPLT dengan ak penerima awal <i>imhoff tank</i>	<p>(1) Kualitas effluen pada <i>outlet</i> tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 tahun 2016</p> <p>(2) Unit <i>imhoff tank</i> sebagai unit pemisahan padatan dan cairan kurang efektif karena tidak ada zona pengendapannya, adanya turbulensi pada saat pembuangan lumpur dari truk tinja ke <i>imhoff Tank</i> sehingga lumpur yang sudah mengendap terangkat kembali.</p> <p>(3) Jarak antara batang/<i>mesh</i> pada saringan pada <i>imhoff tank</i> terlalu besar, sampah yang terbawa dalam tangki masih bisa masuk ke dalam <i>imhoff tank</i>.</p> <p>(4) Ada penyumbatan pada pipa <i>effluen</i> (atas) pada <i>imhoff tank</i>.</p> <p>(5) Kolum <i>anaerob</i> penuh lumpur. Kolum fakultatif dan maturasi terlalu penuh tertutup ganggang sebaiknya dikurangi (diambil dengan jaring).</p> <p>(6) Kolum fakultatif 1 dan maturasi 1 hampir luber, indikasi penyumbatan pada pipa <i>outlet</i>.</p> <p>(7) Kolum Fakultatif 2 kosong, indikasi ada kebocoran.</p> <p>(8) Tidak ada Badan Air Penerima atau saluran drainase untuk mengalirkan <i>effluen</i> dari Kolum Maturasi.</p>	<p>Perbaikan outlet <i>imhoff tank</i></p> <p>Membangun 6 unit SSC (ukuran sesuai kebutuhan dan kondisi lahan)</p> <p>Pemasangan atap unit pengering (SDB)</p> <p>Pemasangan pagar pembatas antar TPA dan IPLT</p> <p>Pemasangan papan nama permanen setiap kolam/unit</p> <p>Rehab bangunan pos jaga</p>	<p>APBD 2021 (dimasukkan sebagai kegiatan prioritas dalam dokumen perencanaan tahunan /Rencana DUPUR</p> <p>Anggaran perubahan 2020</p>	<p>Tersedianya outlet sesuai Permen LHK No. 68/2016;</p> <p>Berfungsi 6 unit SSC</p> <p>Unit SDB teratapi</p> <p>Ada pagar pembatas TPA dan IPLT</p> <p>Terpasang papan nama permanen dari besi plat untuk setiap unit/kolam</p> <p>Pos jaga berfungsi efektif dengan tambahan personil</p>	<p>Rekomendasi untuk optimalisasi IPLT jangka menengah adalah :</p> <p>(1) Pembuatan 1 unit Bak Penerima yang dilengkapi dengan bar <i>screen</i>, yang terpisah dari bangunan <i>imhoff tank</i>. Hal ini dimaksudkan supaya lumpur yang sdh mengendap tidak terjadi teraduk lagi pada saat ada lumpur baru masuk langsung dari truk tinja. Volume Bak Penerima minimal 4 m³.</p> <p>(2) Pengurusan pada Kolum <i>Anaerobik</i> 1 karena sudah dipenuhi lumpur.</p> <p>(3) Mencari penyebab sumbatan pada Kolum Fakultatif 1 dan Kolum Maturasi 1 yang saat ini penuh dan hampir luber. Berdasarkan hasil diskusi, ada 2 kemungkinan yaitu penyumbatan pada pipa <i>effluen</i> Kolum Maturasi 1, atau kesalahan pada kemiringan pipa <i>effluen</i> dari maturasi 1.</p> <p>(4) Pemasangan kanopi pada SDB dan pemotongan tumbuhan di sekitar SDB. Untuk mempermudah pengeringan pada SDB, perlu pemasangan kanopi dari bahan yg masih bisa ditembus sinar matahari (misal fiber), dengan ketinggian 2,5 - 3 m, dan pemotongan tumbuhan di sekitar SDB agar tidak menghalangi sinar matahari.</p> <p>(5) Penambalan kebocoran pada Kolum Fakultatif 2. Namun sebelumnya perlu diidentifikasi terlebih dahulu titik kebocoran/retak.</p> <p>(6) Dibutuhkan upaya untuk mengalirkan <i>effluen</i> dari kolam maturasi ke saluran drainase menuju badan air penerima.</p>
2	Memiliki SOP	SOP untuk OP di IPLT sudah ada	<p>Belum optimal penerapan SOP >>> (administrasi dan SDM) ; manajemen marketing belum maksimal, <i>call center</i> ditangani KalUPT, SDM operasional yang kurang; belum optima fungsi pos jaga</p>	<p>Merealisasikan SOP yang sudah ada; Menyusun SOP sesuai dengan kebutuhan dan kondisi IPLT</p> <p>Pengusulan penambahan personil SDM UPTD PAL dan operasional IPLT sesuai kebutuhan (berdasarkan analisa beban kerja), dari pergeseran/mutasi internal</p>	<p>6 bulan dalam tahun 2020</p> <p>6 bulan dalam tahun 2020 >>> proses menyusut ke Sekda tembusan ke BKPSDMD untuk penambahan personil operasional UPTD PAL</p>	<p>Tersedia SOP yang berfungsi efektif meliputi: mekanisme penyedotan, pemeliharaan kolam, pemeliharaan truk tinja, persuratan, dan penguduan</p> <p>Personil SDM UPTD IPLT dan operasional bertambah yaitu : 2 orang <i>surveyor</i> lapangan; 1 orang operator komputer, 1 orang administrasi dan keuangan; 1 orang pos jaga di IPLT, dan 2 orang operator IPLT, 1 orang Koordinator IPLT.</p>	<p>Evaluasi terhadap dokumen SOP yang sudah ada (disusun pada masa pendampingan IUWASH). Draft SOP yang belum ada dan berhasil disusun bersama, yaitu SOP Operasional <i>imhoff tank</i>, dan Operasional SDB.</p> <p>Rekomendasi untuk penambahan SDM operator di IPLT, dan pencatatan lumpur masuk ke IPLT juga menjadi bagian dari tugas operator IPLT. Rekomendasi bagi operator IPLT untuk menggunakan APD terutama pada saat melakukan pengurusan dan pembersihan.</p>

No	UPTD PALD Sidoarjo	UPTD PAL Parepare	Permasalahan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Output	Output dan Rekomendasi pada Trip 2
				Usulan membuat Aplikasi Layanan Penyedotan ke Diskominfo	Tahun Anggaran 2020	Tersedia Aplikasi Layanan Penyedotan	Belum terbahas
3	Sarana prasana pendukung IPLT ada	2 unit truk tinja, pengadaan TA 2019 dan 1998	3. Rasio kendaraan dengan penerimaan layanan belum cukup	3. Penambahan 1 unit kendaraan	DAK 2021		Direkomendasikan untuk jenis kendaraan yang diusulkan adalah Truk Tinja dengan kemampuan jangkauan penyedotan 200 m. Tidak direkomendasikan untuk pengadaan Motor Tinja karena pengalaman Kab/Kota lain, motor tinja tidak pernah dipergunakan lagi karena volume tangki kecil (500-600 liter), kesulitan manuver, biaya operasional lebih tinggi.
II. PERENCANAAN							
1	Unit <i>drying bed</i> yang memiliki atap	Unit SDB yang tidak tertutup atap	Dengan kapasitas lumpur yang masuk 6 - 8 m ³ hanya dan hanya ada 1 unit SDB saat ini belum ada masalah, namun jika LLTT sudah jalan maka akan menjadi kendala	1. Mengusulkan pembangunan atap pada SDB melalui skema APBD-P 2. Merencanakan penambahan unit SDB melalui skema APBD	6 bulan di tahun 2020	SDB dapat berfungsi sebagaimana mestinya	Rekomendasi : Untuk mempermudah pengeringan pada SDB, perlu pemasangan kanopi dari bahan yg masih bisa ditembus sinar matahari (misal fiber), dengan ketinggian 2,5- 3 m, dan pemotongan tumbuhan di sekitar SDB agar tidak menghalangi sinar matahari. Dengan memperhatikan keterbatasan lahan yang ada, perlu ada penambahan 1 unit SDB lagi dengan dimensi yang sama.
III. KELEMBAGAAN DAN REGULASI							
1	Memiliki staf yang cukup dan sudah terlatih	Memiliki keterbatasan staf dan belum ada pelatihan untuk operator	Keterbatasan kemampuan staf, sehingga diperlukan pelatihan untuk staf dalam operasional IPLT	3. Memfasilitasi staf UPTD mengikuti program pelatihan seperti pelatihan di Balai Pelatihan Teknis PLP atau dengan UPTD lainnya	2 tahun di tahun 2020 - 2021	Formasi personil dalam UPTD lengkap dan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM di UPTD	Rekomendasi : Operator di IPLT dibuatkan semacam Agenda Harian agar kegiatan apa saja yang harus dilakukan, dapat dimonitor dan dievaluasi hasilnya secara berkala. Hal yang nampak sekali adalah pada penuhnya ganggang di Kolam Stabilisasi, harus diambil sebagian adalah sinar matahari tetap bisa masuk ke dalam air, belum ada pencatatan lumpur masuk ke IPLT.
2	Sudah memiliki Perda no 5 tahun 2018, tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Perda No. 2 tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum	Tarif retribusi jasa penyedotan terlalu tinggi, karena berdasarkan volume tangki (per sekali sedot)	Membuat usulan draf Revisi Perda Retribusi Jasa Umum >> penyedotan	Tahun Anggaran 2021	Tarif retribusi sudah lebih terjangkau berdasarkan hasil revisi Perda Retribusi	Rekomendasi : sebaiknya retribusi berdasarkan volume, serta ada variasi jarak dari IPLT, dan jarak sedot. Biaya retribusi yang mencantumkan upah pekerja sebaiknya ditiadakan.

Menangkap Pembelajaran, Mengubah Kebiasaan



Banyak catatan, akan banyak pula pekerjaan ke depan. Proses sedang berjalan. Perbaikan di sana-sini sedang diupayakan. Tentu saja, mengubah sesuatu yang telah sekian lama menjadi kebiasaan, bukan perkara mudah. Apalagi seperti membalik telapak tangan. Hasil akhir mungkin penting. Tapi itu bukan satu-satunya capaian yang hendak didapatkan. Proses pembelajaran, saling berbagi pengetahuan dan memahami apa yang

selama ini tak diketahui, adalah romantika proses belajar itu sendiri.

Proses akan terus berjalan, pembelajaran didapatkan. Lalu apa pembelajaran yang timbul dari proses *twinning program* ini?

Haeruddin menyampaikan, adanya *twinning program* ini menyadarkan pihaknya untuk bisa mengoptimalkan IPLT yang dimiliki. Apalagi jika dilihat bahwa IPLT Parepare dengan Sidoarjo kondisinya tidak

jauh berbeda. Hanya sistemnya yang membedakan selain kondisi IPLT Parepare yang disadari selama ini kurang perawatan. Kesadaran merawat dan memanfaatkan IPLT Alopoe kini telah muncul.

“Di situ saya berpikir harus bekerja dengan baik agar IPLT yang kami punya bisa dimanfaatkan dengan baik,” ujar Haeruddin.

Pembelajaran yang didapatkan dari *twinning program* juga disampaikan Isra dari Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, dengan mengikuti *twinning program* pihaknya bisa mengadopsi langsung atau bisa mengambil apa yang dilakukan *mentor*. Adopsi itu bisa multi aspek mulai dari infrastuktur atau bangunannya, SDM, SOP hingga kelembagaannya. Untuk melakukan proses itu Isra berharap Pemerintah Kota Parepare baik dari aspek anggaran ataupun kebijakan.

Senada dengan Isra, Kepala Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi Dinas PUPR, Aswin melengkapi, pembelajaran yang didapatkan pihaknya adalah munculnya pengetahuan baru dan kesadaran bahwa masih banyak kekurangan yang terjadi di pengelolaan air limbah domestik kotanya. Hal itu tidak saja terkait dengan persoalan dan kondisi teknis di IPLT, namun hal lain yang terkait dan saling mempengaruhi.

“Misalnya saja, kami baru menyadari bahwa marketing kami untuk penyedotan tinja masih sangat lemah. Di sisi lain kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan ataupun aktif di program LLTT juga masih lemah. Ini kelemahan-kelemahan yang kami sadari dari ikut program ini dan menjadi PR untuk kami perbaiki,” tandas Aswin.

Kesan dan pembelajaran agaknya tak hanya didapatkan dari para *mentee*. *Mentor* pun, yang notabene memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih baik daripada *mentee* mendapatkan hal yang sama. Indah Nursanti tak menampik, dirinya mendapatkan pembelajaran baru dari proses bermitra dengan *mentee*. Hal yang sangat mendasar baginya, setelah menjalani proses ini dan melihat kondisi langsung para *mentee*, adalah perlunya eksekusi dari setiap perencanaan yang dicanangkan. Tanpa implementasi rencana, maka apa yang terjadi pada *mentee* akan terus menjadi benang kusut pengelolaan lumpur tinja di negeri ini.

Pengetahuan baru juga didapatnya dari menjadi *mentor twinning program* ini, misalnya saja terkait dengan tarif penyedotan di mana selain masuk ke kas Pemerintah Daerah, juga sebagian bisa



masuk ke UPTD. Selain itu juga, pengetahuannya bertambah dengan mengenal lebih banyak jenis dan sistem IPLT yang dibangun di Indonesia. Selain pembelajaran, Indah juga memiliki harapan besar pada provinsi bisa mereplikasi program *twinning program* ini.

“Saya berharap *twinning program* direplikasi oleh provinsi dengan cara

provinsi menjadi *mentor* bagi kabupaten/kota di wilayahnya,”harapnya.

Proses belajar telah berjalan. Pembelajaran telah didapatkan. Harapanpun dicanangkan. Tentu, semua tak bisa mengharap pada waktu. Pada para pihak yang terlibat inilah, hasil *twinning program* di masa depan digantungkan.



MENATA LEMBAGA, MEMPERBAIKI LAYANAN LUMPUR TINJA

Komitmen Kota Palopo Meningkatkan Layanan melalui *Twinning Program*

Bekerja untuk dua sektor berbeda secara bersamaan, tanpa keahlian dan atau pengalaman memadai, pastilah bukan hal yang mudah dilakukan. Situasi itu seringkali menimbulkan “korban” di salah satu sektor. Di samping soal prioritas, salah satu sektor yang “dianaktirikan” biasanya karena dirasakan lebih sulit dikerjakan.

Kondisi seperti itulah yang dirasakan Syahban (56). Sejak menjadi Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (UPTD TPA IPLT) Kota Palopo pada 17 Desember 2015, ia “terjebak” pada kondisi sulit. Ia ditugasi mengelola dua unit instalasi pengolahan sanitasi yang sama besarnya. Idealnya, pengelolaan sampah dan lumpur tinja sama baiknya. Tapi bisakah keduanya diciptakan, jika ada salah satu sektor di antaranya yang kurang mendapat dukungan, baik dari masyarakat ataupun pengambil kebijakan?

“IPLT akhirnya kurang diperhatikan. Permintaan sedot tinja dari masyarakat belum banyak. Kadang hanya 2 kali penyedotan dalam satu bulan atau paling bagus sekali dalam seminggu. Karena kegiatan di IPLT tidak terlalu padat, akhirnya kami lebih fokus ke TPA atau mengelola sampah,” ujar Syahban.

Sekedar membandingkan, menurut Syahban, jika penyedotan lumpur tinja dan pembuangan serta pengolahan di IPLT rutinitasnya rendah, hal sebaliknya terjadi pada sektor persampahan dan kegiatan di TPA. Setiap hari, aktifitas di TPA cukup padat, bahkan sering berlangsung sampai malam. Jumlah SDM yang mengelola pun

cukup jauh perbandingannya. TPA dikelola 30 orang pegawai, sementara pengelolaan IPLT hanya dilakukan oleh 6 orang saja.

Untuk mendorong operasionalisasi dan layanan IPLT, Syahban mengaku dalam situasi sulit, hingga tak bisa berbuat apa-apa. Peralannya, itu bukan sekedar soal bagaimana mengerjakan, namun modal utama untuk mengerjakannya, yakni ketersediaan anggaran, untuk operasionalisasi IPLT tak ada.



Soal ketiadaan anggaran memang rumit, sebab itu terkait dengan peraturan.

Sebagaimana diketahui, sejak dibentuk tahun 2015 silam, pengelolaan TPA dan IPLT ditugaskan pada satu operator atau UPTD TPA dan IPLT. Operator ini berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), di mana pada tugas pokok dan fungsinya DLH tidak ada sangkut pautnya dengan pengelolaan air limbah domestik atau lumpur tinja. Posisi ini secara otomatis tak menguntungkan IPLT, karena DLH tidak bisa menganggarkan kebutuhan IPLT, karena tak ada kode rekening anggaran yang bisa digunakan. Maka demikianlah, IPLT ada tapi tak dapat dimaksimalkan pemanfaatannya.

Dipisahkan Sebab Tak Sejalan

Kondisi itu berlangsung terus menerus sejak IPLT dibangun pada tahun 2014 lalu. Unit pengolahan ada, tapi karena tak yang bisa secara langsung mengelola, dengan dukungan anggaran, maka IPLT Mancani pun merana.

Kondisi muram pengelolaan lumpur tinja Kota Palopo terus berlangsung hingga pada suatu ketika di tahun 2019, datang penawaran untuk mengikuti *twinning program* pengelolaan air limbah domestik.

Program ini akan memberikan pendampingan untuk perbaikan layanan pengelolaan air limbah domestik dengan jalan menjalin kemitraan dengan operator air limbah domestik kota lain yang kondisinya lebih baik.

Palopo membuka pintu lebar-lebar. FORKALIM Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik bersama dengan Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan, UNICEF-Indonesia dan Yayasan BaKTI kemudian melakukan langkah awal dengan melakukan asesmen. Sampai kemudian akhirnya Kota Palopo masuk menjadi *mentee twinning program* dengan *mentor* UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik (PLCD) Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Rekomendasi dari hasil asesmen untuk Kota Palopo mengikuti kegiatan ini adalah Topik 5 yakni Penguatan dan Penyiapan UPTD PAL baru untuk mengelola limbah (tinja).

Kondisi yang dialami UPTD TPA dan IPLT Kota Palopo sebelum mengikuti *twinning program* bukan satu-satunya di Indonesia. Sejauh ini banyak sekali kabupaten/kota di Indonesia yang melakukannya. Salah satu dasar pertimbangan pembentukan UPTD yang menggabungkan lokasi TPA dan IPLT mayoritas berada di tempat yang berdekatan



atau bersisian. Simplifikasi hanya berdasar lokasi.

Bergabung dengan *twinning program* Palopo bergegas. Langkah awal yang dilakukan adalah membentuk tim. Sunandar dari Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda mengatakan, tim terdiri dari sejumlah OPD yang terkait, di antaranya Bappeda, Dinas LH dan Dinas PUPR. Selain dinas teknis, karena topik pendampingan untuk Palopo terkait kelembagaan, pihaknya pun menggandeng Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kota Palopo. Menurut Sunandar, pihaknya

sangat antusias dan serius mengikuti program ini.

“Itulah sebabnya kenapa, pimpinan kami membentuk tim ini, untuk benar-benar mengikuti dan menyimak baik hasil-hasil pelajaran dari *twinning program* ini,” ujar Sunandar.

Pelaksanaan program diawali dengan kunjungan Kota Palopo ke *mentor* di UPT PLCD Gresik. Kegiatan dilaksanakan tanggal 17-18 Desember 2019. Palopo mengirimkan 5 orang dari perwakilan OPD yang bergabung dalam tim. Selain itu juga didampingi Pokja AMPL Provinsi serta UNICEF-Indonesia dan Yayasan BaKTI.

Pada kunjungan pertama inilah, rekomendasi pemisahan pengelolaan TPA dan IPLT disampaikan. Tentu, rekomendasi tidak asal dikeluarkan, namun berdasarkan identifikasi masalah yang dirasakan dalam tubuh UPTD TPA dan IPLT dalam kurun sejak pembentukannya hingga tahun 2019 itu.

Adapun permasalahan yang selama ini dirasakan, berdasarkan rumusan tim dari Palopo menyangkut sejumlah aspek seperti kelembagaan, peraturan atau regulasi, SDM dan kerja sama dengan pihak lain di luar UPTD TPA dan IPLT Mancani atau dengan pihak di luar Pemkot Palopo.

Terkait aspek kelembagaan, sejumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah keterbatasan kewenangan pengelolaan air limbah domestik, karena UPTD TPA dan IPLT Mancani masih bersatu. Berikutnya, belum adanya "*database*" dan MIS (*management information system*) calon pelanggan potensial LLTT. Selain juga adanya formasi yang masih kosong pada UPTD TPA dan IPLT Mancani Kota Palopo.

Untuk aspek peraturan atau regulasi, peraturan yang telah dimiliki Palopo yakni Perda No 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah belum diketahui oleh masyarakat Kota

Palopo. Kemudian Palopo belum memiliki Perda tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya untuk retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan retribusi limbah cair. Peraturan lainnya yang belum ada adalah Perda/Perkada tentang Kerjasama Kemitraan.

Dalam kesempatan itu pula, Syahban menyampaikan terkait SDM di mana diketahui bahwa selama ini belum ada program peningkatan kinerja SDM TPA dan IPLT Mancani, di samping juga masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pada pengelolaan UPTD TPA dan IPLT Mancani.

"Khusus untuk program peningkatan kinerja operasional IPLT Mancani juga belum ada. Sehingga pengelolaan IPLT selama ini seperti itu-itu saja,"kata Syahban menjelaskan.

Untuk aspek kerja sama dengan pihak ketiga, peran serta masyarakat diidentifikasi sejauh ini belum nampak serta UPTD juga belum ada melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dalam PALD.

Setelah sejumlah persoalan disampaikan tim dari Kota Palopo, tiba gilirannya UPTD PLCD Kabupaten Gresik memberikan input dan membagi pengalamannya mengembangkan kelembagaannya. Sebab sebagaimana

dikatakan Kepala UPT PLCD Kabupaten Gresik, apa yang sekarang ini dialami UPTD TPA dan IPLT Kota Palopo nyaris sama dengan yang dulu terjadi di Gresik.

Menurut Kepala UPT PLCD Gresik, Muhammad Arif Setiawan atau biasa dipanggil Iwan, ketika mengawali sebagai Kepala UPTD tahun 2015, pihaknya benar-benar merintis atau membuka jalan. Ketika itu UPTD yang dibentuk juga masih menggabungkan dua instalasi, di mana IPLT Betooguci kelembagaannya masih satu unit dengan TPA, hal itu sama dengan situasi IPLT Mancani saat ini.

Namun untuk tujuan peningkatan layanan dan lebih profesional maka IPLT Betooguci dikembangkan dengan memisahkannya dari unit TPA. Ketika itu dia bahkan hanya memiliki 1 staf dan tidak memiliki kantor. Dua orang mengurus sebuah operator tanpa kantor, itulah kondisi yang disampaikan Iwan, namun tak membuat dia putus asa atau tak berkreasi.

“Kami membangun dukungan lintas OPD, karena soal sanitasi tidak bisa dilakukan sendiri, harus bareng-bareng. Kuncinya sinergitas antar OPD. Dan sekarang Alhamdulillah, jika dulu kami hanya memiliki



satu staf kini telah berkembang menjadi 30 orang. Artinya kan, bisa berlanjut dan berkembang,” ujar Iwan.

Iwan memberikan tips keberhasilannya, langkah pertama adalah mengikhtiarkan peraturan. Hal ini penting, sebab tanpa peraturan maka pekerjaan tidak bisa dilaksanakan, karena hal itu banyak terkait dengan anggaran dan sebagainya. Maka langkah strategis adalah menyusun payung hukum untuk operasional UPTD dan sarananya, seperti IPLT dan berbagai sarana SPALD lainnya. Proses penyusunan peraturan yang memakan waktu lama



akhirnya berbuah manis dengan disahkannya dua peraturan yakni Perda Nomor 09/2018 tentang Pengelolaan Air Limbah dan Perda Nomor 013/2018 tentang Penyediaan Retribusi dan/atau Penyedotan Kakus.

“Berkat dua peraturan itulah sampai saat ini kondisi eksisting UPT PLCD kami dan pengelolaan IPLT Betoyoguci dapat beroperasi dengan cukup baik yang didukung dengan peraturan yang mencukupi,” ujar Iwan senang.

Pihaknya mengaku belum menjadi operator yang besar, karena terkait dengan kapasitas IPLT dan ketersediaan sarana. Hanya saja, dengan segala keterbatasan yang ada, operasional UPT dapat berjalan maksimal. Meskipun, katanya, target PAD pertahun juga belum terlalu besar yakni 100 juta/pertahun. Tapi jika mengingat sejarah perkembangannya dari semula hanya satu staf dan kini didukung 30 orang pegawai, maka Iwan menyatakan bahagia karena bisa merasakan proses dan menikmati hasilnya.

Secara lebih rinci dalam kesempatan itu Iwan menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan Palopo jika ingin meniru kesuksesan Gresik. Sejumlah langkah itu disiapkan dua pihak yang saling

mendukung yakni regulator atau dinas pengampu serta operator alias UPTD.

Langkah-langkah untuk regulator penyiapan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana pendukung IPLT, melakukan revisi Perda Retribusi Pengolahan Tinja di IPLT dan advokasi kepada pimpinan daerah mengenai pemisahan UPTD TPA dan IPLT. Sedangkan langkah yang dilakukan operator di antaranya penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyiapan SDM dan uraian Tupoksi dan SOP Administrasi dan Teknis serta penyiapan Sistem Manajemen Pelanggan.

“Kami ketika itu juga menyusun rencana kerja UPTD PALD yang mencakup belanja pegawai, belanja modal, dan belanja bahan pakai habis. Ketiga jenis belanja tersebut dijelaskan dengan jenis belanja cakupannya masing-masing,” ujar Iwan.

Selain itu, lanjutnya, langkah sangat penting juga terkait penyiapan SDM dan operasional pemeliharaan IPLT. Selain itu dan tak kalah penting adalah memenuhi kebutuhan staf serta menyusun SOP Penyedotan Lumpur Tinja.

Iwan juga membagi tips yang tak kalah penting bagi UPTD yang baru dibentuk, yakni semangat kerja tim. Dia menekankan

bahwa semua personel di UPTD harus bisa menangani semua persoalan SPALD. Hal itu dulu ditempuhnya dengan membentuk kelompok kerja (pokja) dalam UPTD PLCD.

“Jadi di UPTD kami ada 4 pokja, yaitu pokja yang mengurus IPAL Komunal, Pokja IPLT dan penyedotannya termasuk OM IPLT-nya, kemudian Pokja Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas melakukan promosi dan edukasi ke masyarakat serta pokja keempat untuk pengembangan atau Litbang,” lanjutnya.

Di Pokja Litbang, sebagaimana dikatakan Iwan, pihaknya terus berproses. Di pokja inilah yang menentukan penanganan prioritas pengelolaan SPALD, misalnya saat ini menangani IPAL dan seterusnya. Litbang itu pula yang menjadi kunci UPTD yang dikelola bersama stafnya terus berlanjut sampai hari ini. Lewat pokja itu pula pihaknya membangun sistem.

“Jadi seandainya kepala UPTD berganti, dengan adanya sistem yang berjalan, UPTD tetap berjalan,” tandasnya.

Namun diingatkan Iwan, perjalanan UPTD PLCD Gresik bukan lurus-lurus saja tanpa tantangan. Pihaknya mengaku pernah mengalami masa sulit, di mana selama 2 tahun anggaran alokasi anggaran UPTD

dipotong sampai setengahnya. Anggaran yang ada hanya cukup untuk bayar gaji pegawai sehingga operasional terkendala. Itu menurutnya masa-masa sulit bagi UPTnya yang pernah dirasakan.

Lepas Iwan membagi pengalamannya, Konsultan FORKALIM Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik, Djoko Sugiharto menyampaikan sejumlah rekomendasi dan catatan yang bisa menjadi dasar Palopo untuk membenahi UPTD TPA dan IPLT. Djoko membaginya ke dalam aspek kelembagaan, aspek SDM dan peningkatan kinerja UPT serta regulasi.

Untuk aspek kelembagaan, menurut Djoko, harus dilakukan pemisahan kegiatan TPA Sampah dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Selanjutnya dilakukan pengisian personel pada formasi yang tersedia, baik PNS/ASN maupun Non ASN (THL). Hal itu bertujuan untuk peningkatan kinerja UPTD TPA dan IPLT Mancani sesuai dengan tupoksi yang ada. Kemudian juga perlunya dilakukan evaluasi terhadap personel UPTD TPA dan IPLT Mancani sesuai dengan kompetensi pada jabatan organisasi.

“Perlu juga dilakukan kajian terhadap tupoksi organisasi pengelola air limbah domestik dan pemisahan kegiatan fungsi regulator dengan fungsi operator di Dinas LH,” ujar Djoko.

Djoko juga menyarankan agar dilakukan sensus kepemilikan tangki septik (suspek aman dan cubluk) terutama untuk daerah prioritas layanan. Lalu terkait dengan aspek peningkatan SDM dan kinerja UPTD IPLT, Djoko menambahkan agar dilakukan penyusunan rencana pembiayaan pelaksanaan Diklat tentang Tata Laksana Organisasi dan Operasional IPLT Mancani. Lalu juga melakukan rekrutmen SDM sesuai kualifikasi dan spesifikasi serta pemantauan kualitas *influen* dan *effluen* setiap unit pengolahan secara berkala.

Hal yang tak kalah penting adalah evaluasi kinerja subsistem, termasuk unit pengolahan berdasarkan hasil laboratorium. Pemantauan *influen* dan *effluen* pada masing-masing unit pengolahan ini dilakukan untuk parameter BOD, COD, TSS, pH, amoniak, minyak/lemak dan total *coliform*. Pihaknya juga menyarankan agar segera melakukan evaluasi SOP untuk sub sistem pengolahan di IPLT Mancani. Juga tidak boleh dilakukan juga adalah mengikuti program pelatihan dari berbagai instansi/lembaga yang berkompeten.

Sedangkan untuk aspek peraturan atau regulasi, rekomendasi yang disampaikan adalah menyusun Perda tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya untuk retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan

retribusi limbah cair dan menyusun peraturan turunan dari Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah termasuk regulasi yang mengatur tentang LLTT.

Poin-poin identifikasi dan rekomendasi disusun dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). RKTL yang disusun tim Kota Palopo diuraikan di bawah ini.

NO	IDENTIFIKASI	RENCANA TINDAK LANJUT	DURASI	WAKTU	TARGET PENINGKATAN KINERJA	
					OUTPUT	OUTCOME
1. KELEMBAGAAN						
1.1	Adanya formasi yang masih kosong pada UPTD TPA dan IPLT Mancani Kota Palopo;	Pengisian personil pd formasi yang tersedia, baik PNS/ASN maupun Non ASN (THL), untuk peningkatan kinerja UPTD TPA dan IPLT Mancani sesuai dg. Tupoksi yang ada;	bulan		Personil untuk operasional UPTD menjadi lengkap dan jelas dengan Tupoksi yang pasti	Pengelolaan IPLT Mancani dapat lebih fokus dan terarah, sesuai SOP yang ada.
		Evaluasi terhadap personil UPTD TPA dan IPLT Mancani sesuai dengan kompetensi pada jabatan organisasi	bulan		Terdapat hasil evaluasi kapasitas & kapabilitas SDM UPTD TPA dan IPLT Mancani, sebagai data base SDM	Pengaturan dan pembinaan SDM / personil dapat lebih terarah.
1.2	Kewenangan pengelola air limbah domestik masih sangat terbatas, karena UPTD TPA dan IPLT Mancani masih bersatu;	Kajian terhadap Tupoksi organisasi pengelola air limbah domestik;	bulan		Lembaga PALD dapat berfungsi dengan baik dan benar dalam suasana yg. Akomodatif	Operasional UPTD untuk pengelolaan IPLT Mancani dapat berjalan dengan baik dengan dukungan APBD.
		Pemisahan kegiatan TPA Sampah dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik	bulan			
		Pemisahan kegiatan fungsi regulator dengan fungsi eksekutor di Dinas PKP.	bulan			
1.3	Belum tersusunnya "Data Base" dan MIS calon pelanggan potensial LLTT.	Pelaksanaan sensus kepemilikan TS (Suspek aman & cubluk) terutama untuk Daerah Prioritas Layanan	bulan		Tersedianya data kepemilikan TS aman di Kota Palopo sebagai dasar penentuan calon potensial pelanggan program LLTT.	Perencanaan pengembangan Daerah Layanan LLTT akan lebih terarah.
2. PENGATURAN/REGULASI						
2.1	Perda No 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah belum diketahui oleh masyarakat Kota Palopo.	Perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat	bulan		Masyarakat mengetahui ada regulasi tentang PALD	Masyarakat dapat lebih peduli terhadap masalah air limbah dan kesehatan lingkungan
		Melengkapi regulasi turunannya untuk pelaksanaan program LLTT dengan Perwali	bulan		Masyarakat mengetahui adanya program LLTT	Masyarakat dapat lebih peduli terhadap masalah air limbah dan kesehatan lingkungan
		Melengkapi regulasi turunannya untuk pembentukan lembaga PALD dengan Perwali	bulan		Terbentuknya lembaga PALD	Terlaksananya program LLTT dengan optimal secara gradual / bertahap
2.2.	Belum memiliki Perda tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya untuk retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan retribusi limbah cair	Membentuk Tim Penyusunan Perda/Perkada tentang Retribusi Jasa Umum	bulan		Terbentuknya Tim Penyusunan Perda / Perkada tentang RJU	Adanya percepatan proses penyusunan Perda / Perkada RJU tentang Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
		Melakukan proses penyusunan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangannya	bulan		Ditetapkannya Perda tentang Retribusi Jasa Umum	Adanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam kewajiban pembayaran retribusi penyedotan kakus

NO	IDENTIFIKASI	RENCANA TINDAK LANJUT	DURASI	WAKTU	TARGET PENINGKATAN KINERJA	
2.3	Belum memiliki Perda / Perkada tentang Kerjasama Kemitraan	Membentuk Tim Penyusunan Perda/Perkada tentang Kerjasama Kemitraan			Terbentuknya Tim Penyusunan Perda / Perkada tentang Kerjasama	Adanya percepatan proses penyusunan Perda / Perkada tentang Kerjasama Kemitraan
		Melakukan proses penyusunan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangannya			Ditetapkannya Perda tentang Kerjasama Kemitraan	Adanya kepastian hukum dalam kerjasama dengan Pemda lain maupun dg. Pihak Ketiga/Badan Usaha
3. PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) dan KINERJA IPLT MANCANI						
3.1.	Program Peningkatan Kinerja SDM TPA dan IPLT Mancani	Penyusunan rencana Pembiayaan	bulan		Bertambahnya pengetahuan dan kemampuan ketrampilan SDM IPLT Mancani	Operasional IPLT Mancani dapat berjalan dengan lebih baik.
		Pelaksanaan Diklat tentang Tata Laksana Organisasi dan Operasional IPLT Mancani				
		Penyusunan rencana Pembiayaan Studi Banding ke daerah yang pengelolaan IPLTnya sudah berjalan dengan baik	bulan		Terdatanya Pengelola IPLT Mancani yang sudah beroperasi dengan baik dan siap untuk pelaksanaan sudy banding	Bertambahnya pengetahuan dan kemampuan ketrampilan SDM IPLT Mancani
		Melakukan rekrutmen SDM sesuai kualifikasi dan spesifikasi	bulan		Kapasitas & kapabilitas personil UPTD telah terdata dan sesuai standard yang dibutuhkan.	Operasional IPLT Mancani dapat berjalan dengan lebih baik.
3.2	Peningkatan Kinerja Operasional IPLT Mancani	Pemantauan kualitas influen dan effluen setiap unit pengolahan secara berkala	bulan		Mengetahui kondisi setiap unit IPLT Mancani	Evaluasi Kinerja unit Pengolahan dapat secara periodik dilaksanakan. Perencanaan perbaikan dapat segera ditentukan.
		Evaluasi Kinerja sub-sistem, termasuk Unit Pengolahan berdasarkan hasil laboratorium influen & effluen pada masing- masing unit pengolahan untuk Parameter BOD, COD, TSS, pH, Amoniak, Minyak/Lemak dan Total Coliform	bulan		Memiliki data influen dan effluen tiap unit pengolahan IPLT Mancani	Memenuhi Permen LHK No.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
		Ev aluasi SOP untuk sub sistem pengolahan di IPLT Mancani	bulan		Tersedianya SOP IPLT Mancani sesuai dengan kondisi aktual yang ada.	Operasional IPLT Mancani dapat berjalan dengan lebih baik.
		Perbaikan masing2 sub-sistem PALD mulai dari pewadahan sampai dengan pengolahan di masing-masing unit di IPLT Mancani	bulan		Fungsi tiap unit pengolahan IPLT Mancani menjadi lebih baik	Kapasitas tiap unit pengolahan IPLT Mancani menjadi lebih optimal dengan kualitas effluen sesuai dengan standar Baku Mutu.
3.3.	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pada pengelolaan ALD	Mengikuti program pelatihan dari berbagai instansi / lembaga yang berkompeten	bulan		Meningkatnya kemampuan keahlian dan ketrampilan SDM UPTD PALD Kota Palopo	Pengelolaan ALD Kota Palopo akan lebih optimal
		Melakukan studi banding pada kabupaten / kota yang telah baik dalam melaksanakan PALD	bulan		Meningkatnya wawasan dan pengetahuan SDM UPTD PALD Kota Palopo	Pengelolaan ALD Kota Palopo akan lebih optimal
4. PROGRAM KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA						
4.1.	Peran serta masyarakat belum tampak	Sosialisasi Perda No 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	bulan		Masyarakat paham tentang hak dan kewajibannya	Peran serta masyarakat dalam bentuk apapun dapat meningkat
		Sosialisasi tentang terbukanya kesempatan kerjasama dengan swasta / badan usaha	bulan		Meningkatnya peran serta masyarakat	Kepedulian masyarakat akan hidup sehat lebih meningkat
4.2.	Belum ada kerjasama dengan Pemda lain dalam PALD	Pembentukan TKKSD	bulan		Terbentuknya TKKSD dengan personil yang kompeten	Telah mengikuti prosedur kerjasama kemitraan dengan benar
		Proses kerjasama kemitraan	bulan		Terlaksananya tiap tahapan proses	Adanya kepastian hukum bagi para pihak
		Penandatanganan PKS dengan Pemda lain	bulan		Adanya dokumen otentik tentang kerjasama kemitraan dg Pemda lain	Adanya kepastian hukum dalam kerjasama kemitraan

Surat Disposisi dan Langkah Awal Membenahi

“Sepulang dari Gresik, kami mengadakan pertemuan dengan pimpinan daerah yang diikuti oleh Sekda, Kepala Dinas LH dan tim, Kepala Dinas PUPR dan tim. Tujuannya, melaporkan hasil study visit dan RKTL yang kami susun di Gresik untuk pengembangan kelembagaan di Palopo. Hasilnya, Sekda dan kedua OPD kunci untuk IPLT setuju melaporkan ke Bapak Walikota khususnya berkaitan dengan perlunya ditinjau ulang posisi IPLT yang satu lembaga dengan TPA di bawah Dinas LH.”

Sunandar

Fungsional Bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Kota Palopo.

Usai kunjungan dari Gresik, tim *twinning program* Kota Palopo segera berbenah. Semangat dan energi yang masih penuh sebab mendapat asupan ilmu dan pengalaman dari Gresik, langsung disalurkan untuk langkah perbaikan.

Segera setelah dari Gresik, sebagaimana disampaikan Sunandar, pihaknya menyusun Nota Dinas yang ditujukan kepada Walikota dan disampaikan melalui Sekda terkait pemisahan UPTD TPA dan IPLT.

Masih menurut Sunandar, hasil rapat itu ditindaklanjuti dengan pelaporan ke Walikota. Hasilnya, Walikota Palopo menyetujui untuk pembentukan lembaga baru yang memisahkan UPT IPLT dari UPT TPA.

“Dan hasil terbaru adalah Walikota Palopo sudah menandatangani dan mengeluarkan surat disposisi persetujuan dan untuk segera ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR dan Ortala. Kemudian, Pak Sekda menindaklanjuti dengan satu disposisi, untuk segera menindaklanjuti disposisi pimpinan,” kata Sunandar, dengan nada mantap penuh optimisme.

Kami sudah sepakat, lanjutnya, untuk melanjutkan proses pekerjaan pendirian kelembagaan baru UPTD IPLT di bawah Dinas PUPR yang progresnya sudah menindaklanjuti surat walikota ke Dinas PUPR dan Ortala. Disposisi Walikota, kata Sunandar, memberikan perintah kepada pihaknya untuk membuat telaah staf,

bagaimana memisahkan IPLT dengan TPA. Telaah itu sudah dibuat dan diposisikan kepada Ortala untuk percepatan bagaimana kedua institusi ini bisa fokus. Untuk Dinas LH bisa fokus di persampahan dan limbah B3-nya kemudian untuk PU fokus di pengelolaan IPLT-nya.

Sunandar menyampaikan hal itu di hadapan peserta rapat dalam kunjungan *mentor* bersama tim FORKALIM serta UNICEF dan Yayasan BaKTI, di ruangan Rapat Kepala Bappeda Palopo, 27 Februari 2020. Selama 2 hari, 26 dan 27 Februari,

sebagai balasan kunjungan *mentee* ke Gresik, tiba giliran *mentor* mengunjungi Palopo. Sehari sebelumnya, yakni tanggal 26 Februari, *mentor* dan tim yang hadir mengadakan kegiatan lapangan berkunjung ke IPLT Mancani. Hari kedua itu akan dimanfaatkan mendiskusikan temuan di lapangan. Kegiatan saling berkunjung untuk diskusi dengan melihat fakta lapangan adalah bagian dari mekanisme *twinning program*. Fakta yang didapat segera dikaji dan disusun rekomendasi serta solusinya.



Langkah cepat Palopo itu diapresiasi, baik oleh mentor maupun FORKALIM. Djoko Sugiharto menyampaikan apresiasinya pada progres Kota Palopo itu. Menurutnya, apa yang terjadi di Palopo sangat cepat, utamanya respon dan restu dari pimpinan yang langsung muncul dan segera ditindaklanjuti.

Pada bagian lain, Iwan juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, respon Kota Palopo luar biasa. Di samping progress yang cepat, juga kerjasama dan dukungun parapihak sangat terlihat. Hal itulah yang dibutuhkan Palopo, karena untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lumpur tinja tidak bisa parsial tapi membutuhkan kerja bersama.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemerintah Kota Palopo, Magfirani Nassa, menambahkan, saat ini Ortala dan segenap OPD terkait mengerjakan telaah staf untuk pemisahan kelembagaan dan untuk selanjutnya dihadapkan ke Pemerintah Provinsi Sulsel untuk persetujuan. ditambahkan, untuk saat ini UPTD IPLT bergabung dengan UPTD TPA Mancani yang dikelola oleh Dinas LH. Dalam perkembangannya, ada beberapa dasar yang menjadi pertimbangan sehingga untuk tahun ini kita berupaya untuk

“Di Palopo itu nampak kerja barengnya itu, semua pihak support. Mulai UPTD hingga dinas semua support. Kemudian mau dilakukan peralihan dari Dinas LH ke Dinas PU itu juga supportnya bagus banget. Artinya, kami melihat, inilah yang dibutuhkan Kota Palopo, artinya kalau hanya satu pihak saja yang peduli dan lainnya tidak peduli, tidak akan bisa jalan. Nah ini kan karena kolaborasi antar stakeholders, antar OPD bagus, kami melihat progresnya luar biasa.”

Iwan

Kepala UPTD PALD Gresik, Jawa Timur

memindahkan urusan IPLT ini ke Dinas PUPR.

“Karena memang berdasarkan PP 18 urusan IPLT ada di Dinas PU. Kemudian dikuatkan lagi dengan Permendagri No 90/2019 tentang Kodefikasi dan Klasifikasi Program dan Kegiatan, sehingga dengan

dasar itu kami akan membuat usulan ke provinsi untuk memisahkan TPA dengan IPLT. Ketika urusan itu tetap dilaksanakan Dinas LH, penganggarannya tidak bisa diberikan, karena berdasarkan kodifikasi itu mata anggarannya tidak ada. Itulah sehingga mau tidak mau harus dipisahkan antara IPLT dengan TPA,”ungkapnya menjelaskan.

Ditambahkan pula, kajian akademiknya telah dikirimkan ke Biro Ortala Provinsi. Hanya saja, ujarnya, ada kendala sedikit terkait dengan Permendagri No 12/2017 bahwa untuk membentuk UPTD ini harus sekaligus memperhitungkan besaran UPTD. Jadi ketika TPA dan IPLT terpisah, keduanya harus memberikan usulan. Hal ini menimbulkan konsekuensi kajian akademik harus masuk dari kedua sektor, sehingga kedua-duanya bisa diketahui apakah bisa berdiri masing-masing atau tidak. Demikian juga tipe UPTD bisa diketahui dari kajian akademiknya.

“Saat ini kajian akademik IPLT sudah kami kirimkan ke provinsi, tapi kajian akademik TPA belum selesai disusun oleh Dinas LH. Karena hal ini kami minta waktu tenggang lagi. Biro Organisasi meminta keduanya harus sama-sama dibahas sehingga tidak ada lagi urusan dan tumpang tindih

kewenangan. Jadi keduanya harus dibahas bersamaan,”jelasnya.

Iwan menambahkan, saat ini kelembagaan adalah masalah krusial yang harus segera dibenahi, yakni pemisahan UPTD TPA dengan UPTD IPLT. Menurutnya, jika kedua UPTD sudah terpisah dan induknya sudah ada, semuanya akan mengikuti. Anggarannya ada, SDM-nya ada, nanti perlahan-lahan akan tersusun dengan baik. Kalau kelembagaan belum tuntas, hal itu akan menghambat sampai ke belakangnya. Dia mengatakan, sebenarnya perbaikan kelembagaan itu bisa paralel dengan aspek lain, misalnya dengan regulasinya dan dengan perbaikan IPLT-nya.

“Tapi untuk tahap awal dan paling krusial ya lebih baik kelembagaannya dulu,” tegasnya.

Sementara proses pemisahan lembaga berjalan, Kepala UPTD TPA dan IPLT, Syahban memastikan, pihaknya tetap beroperasi walaupun tidak maksimal. Pihaknya tetap melayani masyarakat kalau ada permintaan. Karena pihaknya belum didukung sarana yang memadai, menyebabkan bekerja berlangsung apa adanya.

Ditanya jika ke depan kedua IPLT dipisahkan dan dia mau mengurus yang

mana, TPA atau IPLT, Syahban siap ditempatkan di mana saja. Namun dia berharap bisa mengelola UPTD IPLT atau PALD yang akan dibentuk.

“Tapi kalau bisa tetap di IPLT saja, agar ilmu kami dapat disalurkan di IPLT, mudah-mudahan pemerintah mendengar permintaan kami ini. Harapan dan semangat kami sangat besar untuk program ini,” janjinya.

Catatan dari Mentor

Menyimak proses yang berlangsung di antara Kota Palopo dan Gresik, Iwan menyatakan bahwasanya untuk pendampingan kelembagaan tidak bisa murni hanya bicara kelembagaan. Pada saat yang sama, ketika proses perbaikan atau pembenahan kelembagaan berjalan, aspek non teknis juga memerlukan penanganan. Pendampingan multi aspek ini menurutnya paket yang lengkap. Karena dalam topik 5 *twinning program* ini, di situ mulai dari aspek kelembagaan ada, aspek teknisnya juga ada.

Oleh karenanya, dalam diskusi hari kedua itu, hasil kunjungan ke IPLT Mancani juga turut serta dibahas dan dibicarakan rekomendasi dan solusi teknis ke-IPLT-an. Sehari sebelumnya, saat berada di lokasi IPLT, baik *mentor* maupun tim *mentee* bersama-sama mengamati setiap komponen bangunan IPLT yang mencakup *imhoff tank* (bak pemekatan), kolam *anaerobic*, aerobik, fakultatif, bak pengering, dan komponen pendukung lainnya.

Hasil pengamatan yang didiskusikan meliputi sejumlah aktifitas yang harus rutin dilakukan di IPLT seperti pengambilan lemak minyak, scum yang mengapung di bagian atas bak, pengaliran lumpur ke bak sedimentasi menggunakan pompa atau secara gravitasi melalui lubang-lubang pengaliran, melakukan pembersihan rutin lubang-lubang pembersihan dan menjaga tekanan dan elevasi aliran *imhoff tank* dengan penambahan air.

Selain itu, pengurasan lumpur dari bak pencerna (*digester*) untuk dipindahkan ke bak pengering lumpur secara rutin setiap 1 bulan menggunakan pompa lumpur serta menjaga proses lumpur aktif yang terjadi di ruang pencerna. Satu aktifitas lagi yang dibutuhkan adalah pemeliharaan rutin pompa pengurasan lumpur.



Secara umum, menurut Iwan, kondisi IPLT Mancani sudah cukup memadai bahkan hingga 2030 tidak perlu membangun IPLT lagi. Masalah teknis yang harus digaris bawahi, menurutnya adalah terkait kondisi *imhoff tank*. Dalam pengamatannya, detensi *imhoff tank*-nya belum terpakai secara optimal. Contohnya lumpur belum sampai ke bak yang di tengah, yang untuk proses digesternya belum masuk ke sana. Ke depannya, ujarnya, diperlukan pompa menyedot untuk membuang ke SDB.

“Proses itu belum ada. Masih perlu pembenahan-pembenahan. Kemarin ada beberapa opsi kalau memang *imhoff* ini tidak bisa dioptimalkan akan memakai opsi yang sederhana dulu, mau mengubah bak di SDB dimodifikasi sedikit menjadi SSC. Nah di situ jadi catatan lagi, kalau mengubah itu menjadi SSC, proses masih bisa berlangsung, tapi tidak bisa optimal. Karena dengan kapasitas yang hanya 3 bak, kalau kita hitung hanya 10 kubik. artinya dari 70 terjadi penurunan cukup signifikan,”catatnya.

Oleh karena itu, ujar Iwan, upaya mengoptimalkan *imhoff* untuk saat ini menjadi pilihan. Untuk hal-hal yang mendesak dan harus segera ditangani, menurut Iwan adalah perlunya dilakukan uji elevasi pengaliran, uji kebocoran serta dilakukan pengukuran waktu tinggal perubahan, karena terkait dengan perubahan fungsi bak pengering menjadi bak pemekatan. Hal lainnya berkaitan dengan penambahan bak penerima lumpur dan saringan untuk pemisahan sampah.

“Perlu juga dilakukan modifikasi atap untuk membantu proses evaporasi, pencucian media kerikil, pasir dan penambahan *grassblock* untuk lapisan atas dan pembersihan rutin bak *screening* (keranjang sampah) limbah tinja sebelum masuk ke *imhoff tank*,”ujarnya.

Terkait rekomendasi teknis tersebut, tim mentee menyepakati akan memperbaikinya dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas LH, Kepala Dinas PUPR dan Bappeda. Adapun komponen yang akan diperbaiki mencakup uji elevasi pengaliran, uji kebocoran serta dilakukan pengukuran waktu tinggal terkait dengan

perubahan fungsi bak pengering menjadi bak pemekatan. Hal lainnya adalah penambahan bak penerima lumpur dan saringan untuk pemisahan sampah.

Perbaikan dan langkah pembenahan teknis juga akan menindaklanjuti rekomendasi *mentor* lainnya seperti modifikasi atap untuk membantu proses evaporasi, pencucian media kerikil, pasir dan penambahan *grassblock* untuk lapisan atas serta pembersihan rutin bak *screening* (keranjang sampah) limbah tinja sebelum masuk ke *imhoff tank*.

Pembelajaran untuk Pengembangan Kelembagaan

Setiap proses meninggalkan kesan, juga pembelajaran. Seringkali, ketika proses sedang berjalan, lelah atau letih dan mungkin bosan tak jarang mengganggu perjalanan. Namun di setiap awal keluhan, sesungguhnya sebuah pembelajaran sedang dirasakan. Dalam jalinan kemitraan *twinning program* hal itu setidaknya dirasakan *mentee* dan *mentor*. Lalu apa yang tertinggal sebagai pembelajaran dari proses pendampingan dan saling belajar di antara Palopo dan Gresik?

“Saya kira banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Baik dari apa yang



kita lakukan dengan kunjungan ke Gresik maupun Gresik berkunjung ke Palopo. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi pembelajaran berharga bagi kita,”kata Erdin, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Palopo.

Hal pertama, lanjut Erdin, kita harus selalu mengupdate informasi, utamanya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan proses pelaksanaan maupun teknis dalam IPLT khususnya untuk rencana pelaksanaan LLTT. Jadi kita tidak bisa cukup dengan yang ada sekarang, tetapi kita harus selalu

mengupdate, apakah itu dalam bentuk konstruksinya, maupun dalam bentuk operasionalnya atau dalam bentuk kemampuan atau kapabilitas dari teman-teman yang bertugas mengelola di sana.

Lalu hal kedua, menurut Erdin, harus selalu ada membuka jaringan. Bagaimana pemda atau pengelola di IPLT membuka jaringan ke luar. Tujuannya untuk mendapatkan informasi-informasi, jadi kita bisa melihat apa yang dilakukan orang di tempat sana, mungkin ada sesuatu yang bisa diterima dan diimplementasikan sesuai dengan

Pembelajaran lainnya adalah proses saling belajar dan timbal balik antara mentee dan mentor yang berjalan baik. Misalnya, pihaknya bisa melihat beberapa hal positif yang ada di mentee dan hal itu bisa menjadi sesuatu yang bagus buat mentor dan bisa meningkatkan kinerjanya. Jadi menurut saya twinning program timbal baliknya cukup bagus.

Iwan

Kepala UPTD PALD Gresik, Jawa Timur

kondisi kita. Pelaksanaan *twinning program* dikatakan Erdin adalah buah adanya pohon jaringan dengan pihak di luar, baik FORKALIM Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik, UNICEF-Indonesia dan Yayasan BaKTI maupun IUWASH PLUS.

“Lalu yang ketiga, tak kalah penting adalah komitmen. Melalui program ini kita sudah memperlihatkan bahwa semua yang terlibat di program ini, pemprov, pemkot, dan lainnya, saya kira semua memiliki komitmen. Saya kira itu yang paling penting,” tutup Erdin.



Senada dan seide gagasan dengan Erdin, Sunandar menyatakan bahwa pemahaman tenaga pengelola di IPLT terkait dengan tugas dan fungsinya adalah pelajaran terbaik yang bisa didapatkan. Menurutnya, *twinning program* mengubah pola pikir para tenaga pengelola IPLT. Teman-teman operator di IPLT, lanjut Sunandar, selama ini menganggap bahwa IPLT sebagai wilayah yang kotor. Setelah mengikuti *twinning program*, pemahaman itu berubah.

“Sekarang ada *image* baru bahwa sebenarnya IPLT bila dikelola dengan baik bukan hanya berdampak pada peningkatan kualitas sanitasi, tetapi lebih luas



berdampak pada sosial ekonomi. Saya kira hal ini bisa menjadi pelajaran terbaik bagi kami,” ujar Sunandar, mengakui.

Dalam konteks lebih luas, yakni kelembagaan, Sunandar menyatakan, pihaknya kini memiliki kesadaran baru terkait regulasi kelembagaan. Kesadaran itu terkait PP No.2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, di mana urusan air limbah domestik berada di bawah Dinas PU.

Koleganya di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Andi Ira Kusuma Wardani, menyatakan hal yang sama. Menurutnya, *twinning program* sangat

menarik, karena pihaknya mendapat informasi dan sharing kondisi-kondisi dari daerah lain. Selain itu, melalui *twinning program* dia mengaku begitu banyak mendapat pengetahuan baru.

“Pembentukan kelembagaan baru ini, kami juga dapatkan dari *twinning program*. Termasuk di dalam berita acara terima aset IPLT. Di Gresik itu kasusnya sebenarnya sama dengan kita bahwa mulai dari bangunan IPLT yang belum ada berita serah terima asetnya. Tapi tanpa itu pengelolaan tetap berjalan dan bisa dianggarkan,” ungkapnya.



Terkait berita acara serah terima aset itu, pihaknya akan mencontoh apa yang ditempuh Gresik, yakni mengirim surat ke provinsi agar pengelolaan IPLT Mancani bisa didukung anggaran. Ira juga mengatakan, hal teknis di IPLT seperti pembenahan kolam SDB untuk dialihfungsikan menjadi SSC juga didapatnya dari *mentor* atau UPT PLCD Gresik.

Pembelajaran lain, sebagaimana diceritakan Andi Ira, adalah peningkatan kemampuan

pihaknya yang kini dapat melahirkan beberapa identifikasi masalah dalam RKTL, terkait perubahan kelembagaan dan teknis IPLT. Hal itu sebelumnya tidak bisa dilakukan, utamanya hal-hal teknis di IPLT atau TPA. *Twinning Program*, lanjut Ira, mengajarkan padanya memahami persoalan dan mengatasi permasalahan yang timbul. Pun pada persoalan teknis yang selama ini belum pernah diketahui.

Pembelajaran juga diterima dan dirasakan benar oleh Syahban. Sebagai orang yang

diserahi tanggung jawab mengelola IPLT, dia mengaku senang sekali mengikuti *twinning program*. Pasalnya, sejak terbentuknya UPTD TPA dan IPLT tahun 2015, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu karena ketiadaan anggaran sebab terhalang peraturan. Sehingga kalau ada sarana yang rusak pun tidak bisa diperbaiki, karena anggaran perawatan pun tidak ada.

“Nah dengan adanya *twinning program* ini kami sangat bersyukur, dapat dibantu untuk pemisahan UPTD IPLT. Kami juga senang karena selain menambah ilmu pengetahuan saya, juga mendorong kami bekerja ke depannya lagi lebih fokus karena pembentukan lembaga baru nanti menjadi UPTD IPLT sendiri,”harapnya.

Kesan dan pembelajaran tak hanya dirasakan para *mentee*. Sang *mentor* pun, UPTD PALD Gresik, merasakan hal yang sama. Iwan menjelaskan, dari sisinya selaku *mentor* mendapat banyak pembelajaran. Misalnya terkait proses sinergi antar OPD yang sangat cepat. Hal itu memberi pembelajaran bagi saya, misalnya, itu apa sih yang membuat percepatan proses itu. Kenapa Palopo bisa secepat itu progresnya.

“Jadi itu kemarin yang sempat saya gali ke Pak Sunandar. Setelah dijelaskan, itu yang menjadi pembelajaran buat kami,”ungkapnya.

Selain itu, pembelajaran penting yang didapatnya adalah bahwa *twinning program* bisa diimplementasikan tidak hanya sesama daerah seperti Gresik dengan Palopo, tapi juga bisa diimplementasikan di internal. Dia mengilustrasikan apa yang berlangsung di Palopo, yakni rencana mengalihkan UPTD IPLT dari Dinas LH ke Dinas PU. Menurutnya dalam proses pemindahan ini juga bisa diterapkan strategi *twinning program* yakni proses *transfer knowledge*.

“Mentornya mungkin bisa dari Dinas LH, karena mereka sudah lama mengelola IPLT, karena ini ada OPD baru yang akan pegang, yaitu Dinas PU, akan ada satu organisasi baru di Dinas PU, UPTD PALD, misalnya, bisa jadi *mentee*-nya,”papar Iwan.

Prinsip dasar saling belajar dan melakukan transfer pengetahuan, menurut Iwan, adalah nilai-nilai pembelajaran yang didapatkan dari *twinning program*.



BERMITRA MENGELOLA LUMPUR TINJA

Catatan Pembelajaran *Twinning Program*
Pengelolaan Air Limbah Domestik
di Sulawesi Selatan